KAJIAN PERILAKU *FRAUD* DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

TESIS

Diajukan Oleh :

Indrawati Usuli
18919028

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 September 2020



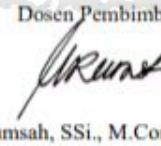
Indrawati Usuli

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Drs. Dekar Urumsah, SSi., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

INDRAWATI USULI

No. Mhs. : 18919028

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

KAJIAN PERILAKU FRAUD DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Drs.Dekar Urumsah,SSi.,M.Com(IS).,Ph.D.,CFrA.	Arief Rahman,SE.,SIP.,M.Com.,Ph.D.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi,

Drs. Dekar Urumsah, SSi.,M.Com.,Ph.D.,CfrA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT karena dengan izin dan kuasa-NYA tesis yang berjudul "Kajian Perilaku *Fraud* dalam Proses Perencanaan dan penganggaran" dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan hingga berada di zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga syafaat beliau sampai kepada kita hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun guna memenuhi prasyarat menyelesaikan Program Master (S-2) pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Adapun dalam penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf akademika.
2. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si. atas kesempatan yang diberikan kepada penulis hingga dapat menimba ilmu di Fakultas tercinta.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi yang juga selaku dosen pembimbing, atas segala kebaikan, bimbingan, dan arahannya selama ini. Komunikasi yang sangat baik di tengah pandemi, ditengah keterbatasan bertatap muka tidak

lantas menghambat proses bimbingan sehingga Alhamdulillah penulis bisa sampai ketahap ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan bagi bapak dalam menjalankan segala aktivitas. Penulis bangga dan beruntung bisa bertemu dan dibimbing oleh bapak.

4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dan rekan-rekan di Maksi 17. Suatu kesempatan yang luar biasa bertemu dengan dosen-dosen terbaik yang dengan ikhlas mentransfer *knowledge* dan *skill*nya kepada kami.
5. Seluruh admisi yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan akademik kami selama menempuh pendidikan di Maksi 17. Pak Taufiq, Mbak Iin, Mbak Tika. Terima kasih atas segala bantuannya.
6. Orang tua tercinta, Bapak Yuni Usuli yang tidak pernah henti-hentinya mendoakan keberhasilan anaknya, Almarhumah mama Rita Adipu yang tidak sempat menyaksikan keberhasilan anaknya tetapi do'a ini tidak akan pernah berhenti mengalir untukmu mama. Ibu mertua tercinta mama Zenab Tulen yang tidak henti-hentinya memanjatkan do'a dan memberikan support baik moril maupun materil, ayah mertua tercinta Alm. Abdul Wahab Bouty. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan menempatkannya di syurga firdausnya.
7. Suami sekaligus teman *sharing* terbaik, Abd. Aziz Bouty yang dengan sabarnya memberikan banyak masukan terkait penyelesaian tesis penulis, memberikan motivasi dan perhatian bagi penulis ditengah perjuangannya menyelesaikan disertasi. *I'm finished* pah, *you must continue your struggle*.

8. Anak-anak tercinta Andra Fahrezi Bouty, Sandy Alvarizel Bouty, Uwais Alqorni Bouty. Terima kasih sudah menemani mama dan papa berjuang menyelesaikan studi. Kalian motivasi terbesar mama nak.
9. Semua responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
10. Teman-teman seperjuangan di Maksi 17. Ical, Mas Surya, Pak Agus, Bayu, Faruq, Faisal, Andi, wiwik, Lia, Fenti, Dinah, Mba Dini, Mba Silvy, Aisyah, Atikah, Desi, Annisa, Mba Linda, Mba Yaya, Bu Rubi, Kalis. Bangga dan beruntung bisa bertemu orang-orang hebat seperti kalian. Semoga Allah mewujudkan semua cita-cita dan harapan kalian. Aamiin..

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya penulisan tesis ini. Penulis haturkan terima kasih, semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada hal-hal yang belum sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan Akuntansi kedepan.

Yogyakarta, September 2020

Penulis

Indrawati Usuli

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 9
1.5. Sistematika Penulisan 10

BAB II KAJIAN TEORITIS 11

2.1. Definisi *Fraud* 11
2.2. *Fraud Tree* 13
2.3. Teori *Fraud Diamond* 14
2.4. *Theory of Planned Behavior* 18
2.5. Perencanaan dan Penganggaran 20
2.6. Penelitian Terdahulu 23
2.7. Perumusan Hipotesis 27
2.8. Kerangka Pikir 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 36

3.1. Populasi dan Sampel 36
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 37
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 38
3.4. Teknik Analisis Data 47
3.5. Uji Kualitas Data 48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 51

4.1. Hasil Pengumpulan Data 51
4.1. Deskripsi Responden 53
4.2. Hasil Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) 54

4.3. Hasil Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*) 65
4.4. Pembahasan..... 67

BAB V PENUTUP..... 80

5.1. Kesimpulan 80
5.2. Kontribusi Penelitian 82
5.3. Implikasi Praktis 83
5.4. Keterbatasan Penelitian..... 83
5.5. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran 22
Tabe; 2.2. Penelitian Terdahulu 23
Tabel 3.1. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Tekanan Eksternal ... 39
Tabel 3.2. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Kelemahan Sistem Informasi 40
Tabel 3.3. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Budaya Etis Organisasi 41
Tabel 3.4. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Sikap 42
Tabel 3.5. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Norma Subjektif 43
Tabel 3.6. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Kontrol Perilaku 44
Tabel 3.7. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Niat 45
Tabel 3.8. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel *Fraud* 46
Tabel 4.1. Data Responden Berdasarkan Posisi 52
Tabel 4.2. Data Responden Berdasarkan Wilayah 52
Tabel 4.3. Data Penyebaran Kuisioner 53
Tabel 4.4. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 53
Tabel 4.5. Data Responden Berdasarkan Usia 54
Tabel 4.6. Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 54
Tabel 4.7. Nilai *Item Loading* dan Nilai AVE Awal 55
Tabel 4.8. Nilai *Item Loading* dan Nilai AVE Akhir 58
Tabel 4.9. Perbandingan Nilai Item Loading dan Nilai AVE Awal dan Akhir 60
Tabel 4.10. Nilai *Cross Loading* 62
Tabel 4.11. Nilai Korelasi Antar Variabel 63
Tabel 4.12. Nilai *Composite Reliability* 64
Tabel 4.13. Hasil Uji *Collinearity* (*Inner VIF Values*) 65
Tabel 4.14. Hasil Uji *Coefficient Determinant* (*R-Square*) 65
Tabel 4.15. Hasil Uji Signifikansi (Uji-t) 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. *Fraud* yang paling merugikan di Indonesia 1
Gambar 2.1. *Fraud Diamond* 15
Gambar 2.2. *Theory of Planned Behavior* 19
Gambar 2.3. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah 21
Gambar 2.4. Kerangka Pikir Penelitian..... 35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisioner Penelitian
Lampiran 2 Tabulasi Data
Lampiran 3 Diagram Model (PLS Algorithm) – Awal
Lampiran 4 Diagram Model (PLS Algorithm) – Akhir

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan teori *fraud diamond* dan teori *Planned Behavior*. Masing-masing faktor diwakili oleh proksi tekanan eksternal (tekanan), kelemahan sistem informasi (kesempatan), budaya etis organisasi (rasionalisasi), dan niat, serta sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (*Capability*). Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh total 161 pegawai bagian perencanaan dan auditor inspektorat dari seluruh Indonesia. Data dianalisis dengan metode kuantitatif deskriptif, yang diuji menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menemukan bahwa kecurangan dalam proses perencanaan dan penganggaran dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan niat. Adapun niat itu sendiri dipengaruhi oleh sikap dan kontrol perilaku.

Kata Kunci: *fraud*, teori *fraud diamond*, teori *planned behavior*, *fraud* perencanaan dan penganggaran

ABSTRACT

This study aims to look at the factors that influence fraud behavior in the planning and budgeting process based on the fraud diamond theory and the Planned Behavior theory. Each factor is represented by proxies of external pressure (pressure), weaknesses in information systems (opportunities), organizational ethical culture (rationalization), and intentions, as well as attitudes, subjective norms, and behavior control (Capability). The research sample was determined using purposive sampling method, and obtained a total of 161 employees of the planning department and auditors of the inspectorate from all over Indonesia. Data were analyzed using descriptive quantitative methods, which were tested using Partial Least Square (PLS). The results found that fraud in the planning and budgeting process was influenced by external pressures and intentions. The intention itself is influenced by attitude and behavior control.

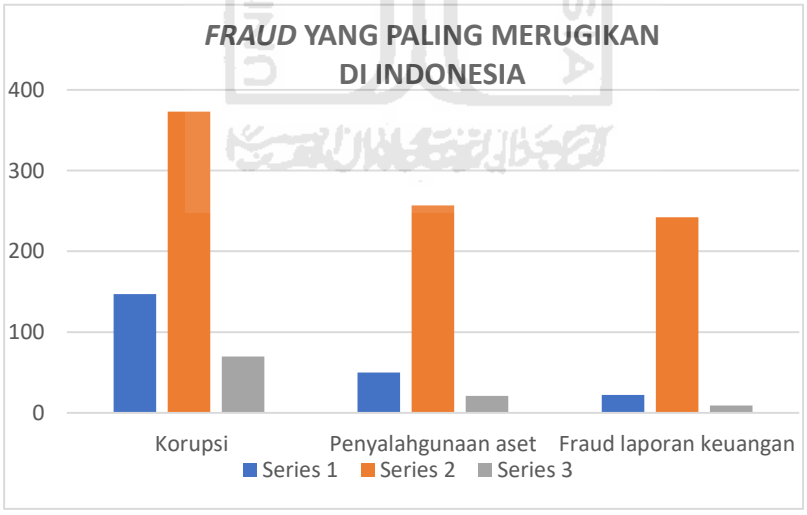
Keywords: Fraud, fraud diamond theory, theory planned behavior, fraud planning and budgeting

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan masalah yang merajalela di semua lini kehidupan masyarakat. Korupsi sebagai salah satu jenis *fraud*, telah menjadi masalah terbesar dalam birokrasi pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Tetapi hasil yang dicapai masih belum sebanding dengan peningkatan kasus korupsi yang terjadi setiap tahunnya. Dari data laporan tahunan ACFE Indonesia 2019, kasus *fraud* terbesar di Indonesia adalah korupsi, disusul penyalahguanaan aset dan *fraud* laporan keuangan.



Gambar 1.1. Grafik *Fraud* yang paling merugikan di Indonesia
Sumber : Laporan ACFE 2019

Untuk tahun 2019 KPK merilis terdapat 2.780 laporan pengaduan terkait tindak pidana korupsi yang telah diverifikasi. Di tahun sebelumnya, tahun 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merilis bahwa ada 21 Kepala Daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Jika dirata ratakan KPK menangani hampir 2 kasus korupsi setiap bulannya. Hal ini menunjukkan keterlibatan pimpinan daerah yang masih cukup tinggi pada kasus korupsi di daerah. Pengelolaan keuangan dan pengawasan juga masih patut dipertanyakan walaupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada sebuah daerah tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa daerah tersebut bebas dari bahaya laten korupsi (Heriningsih, 2015).

Perilaku *fraud* dalam pemerintahan merupakan hal yang sulit dihilangkan karena berhubungan dengan mental dari Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksananya. Dari survei KPK tahun 2018 terungkap 2 dari 10 pegawai di instansi peserta survei yang terdiri dari 36 instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah melihat bahwa pelapor praktik korupsi dikucilkan, diberi sanksi atau dihambat karirnya. Tidak dapat disangkal bahwa praktek korupsi masih terus merajalela di pemerintahan negeri ini. KPK juga mengurai 8 sistem bermasalah dalam kegiatan pemerintah yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah (https://www.kpk.go.id).

Dalam konteks pengelolaan keuangan, proses perencanaan dan penganggaran merupakan muara pelaksanaan kegiatannya. Jika prosesnya baik maka turut mempengaruhi keberhasilan proses pengelolaan keuangan lainnya. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004 perencanaan merupakan serangkaian proses yang

dilakukan untuk menetapkan tindakan masa depan yang tepat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan penganggaran menurut Mardiasmo (2018) terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan stratejik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan hasil perumusan strategi dan perencanaan stratejik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi terciptanya tujuan organisasi.

Idealnya segala sesuatu yang sudah direncanakan dan tertuang dalam proses perencanaan melalui mekanisme yang panjang mulai dari tingkat bawah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat desa dapat diakomodir ke dalam anggaran yang telah disusun dengan memperhatikan kebijakan prioritas anggaran, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Namun yang banyak terjadi adalah anggaran yang telah disusun tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Iskandar, dkk., (2013) menyatakan keterbukaan atau informasi yang didapat oleh publik pada perencanaan APBD hanya didapatkan pada awal proses penyusunan yakni pada tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) selanjutnya pada tahap pelaksanaan pengelolaan APBD dan tahap akhir

pengelolaan APBD informasi keterlibatan publik terputus dan tidak dipublikasikan secara terbuka. Artinya publik hanya dilibatkan pada saat rencana awal.

Besarnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tidak sinkron dengan alokasi anggaran yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat karena eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan hak dari pada kewajibannya sehingga pengalokasian anggaran tidak sejalan dengan peraturan dan undang undang yang ada. Hal ini juga mengarah kepada ego sektoral yang cenderung menimbulkan ketidakadilan. Keterlambatan pembahasan anggaran juga menjadi celah terjadi penyimpangan dengan cara "main mata" dan negosiasi antara kedua pihak (Razak dkk., 2011). Untuk kepentingan masing masing, pihak yang terlibat dalam proses tersebut memasukkan usulan proyek proyek besar yang menguntungkan salah satu pihak dan memperjuangkan penetapan proyek yang mudah dikorupsi dengan harapan mendapatkan *fee project* yang cukup besar (Jumaidi, 2014).

Indriani dkk., (2019) menyatakan bahwa praktik *fraud* dalam penyusunan RKA adalah merencanakan rekening belanja yang mudah di SPJ kan, memanfaatkan kesempatan berupa celah hukum atau aturan yang kurang efektif untuk menjalankan aksinya. Berbagai permasalahan dalam proses penganggaran mulai dari ratifikasi anggaran, implementasi, dan evaluasi baik itu perilaku disfungsional berupa penyelewengan anggaran, perilaku oportunis eksekutif dan legislatif, mark up anggaran/*budgetary slack* sampai dengan tahap implementasi seperti kolusi pengadaan barang jasa serta tahap evaluasi yang melibatkan pemeriksa internal maupun eksternal mengindikasikan bahwa penyelewengan anggaran (korupsi) sudah dimulai pada saat perencanaan (Yuhertina, dkk.,2015).

Praktek suap menyuap marak terjadi yang melibatkan Kepala Daerah dan Anggota Legislatif. Kasus Gubernur non aktif Provinsi Jambi Zumi Zola yang menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi dengan total 16,34 milyar rupiah untuk memuluskan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan menerima gratifikasi sebesar 37,477 milyar rupiah, 173.300 dolar Amerika, 100.000 dolar Singapura dan satu unit Toyota *Alphard*. Kasus 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBDP Kota Malang tahun anggaran 2015 (www.kpk.go.id).

Kasus-kasus di atas merupakan cermin permasalahan perencanaan dan penganggaran yang menjadi celah terjadinya *fraud* di Indonesia. Masih lemahnya sistem informasi perencanaan dan penganggaran seringkali dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam proses ini. Sistem informasi yang digunakan saat ini hanya digunakan untuk kebutuhan setiap tahapan baik itu *e-planning* yang digunakan dalam sistem perencanaan, maupun *e-budgeting* yang digunakan dalam sistem penganggaran. Hal ini menjadi salah satu celah terjadinya *fraud*. Beberapa daerah sudah menerapkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi hal ini belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan *fraud* dalam lingkup perencanaan dan penganggaran.

Kasus lem Aibon Pemda DKI yang menjadi sorotan publik setelah muncul di laman apbd.jakarta.go.id merupakan salah satu kasus yang muncul ke permukaan terkait kekurangan sistem informasi yang digunakan. Usulan kebijakan penyusunan anggaran dan prioritas platform anggaran sementara (KUA-PPAS) tersebut

mengalami kejanggalan, karena lem Aibon dianggarkan sebanyak 82, 8 milyar dan pengadaan *ballpoint* jenis *pen drawing* senilai 123, 8 milyar. Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa hal tersebut terjadi, karena kelemahan sistem *e-budgeting* dari periode sebelumnya (www.cnnindonesia.com).

Untuk mengatasi kelemahan sistem perencanaan penganggaran dan mempersempit celah *fraud* dalam proses ini, pemerintah mengembangkan aplikasi Krisna 3.0 yang digagas kementrian PPN/Bapenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beserta Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan guna penyempurnaan integrasi kedua sistem tersebut (www.Menpan.go.id).

Banyak penelitian yang menjelaskan mengenai fenomena *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran. Wasana (2018) menjelaskan intervensi politik DPRD, komitmen pemangku kepentingan turut menjadi faktor yang mempengaruhi perencanaan dan penganggaran. Yuhertiana, dkk., (2015) dalam penelitiannya menyatakan Eksekutif dan Legislatif menggunakan *discretionary power* untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri sehingga perilaku tersebut mendorong terjadinya *fraud*. Abdullah (2012) memandang setiap tahapan penyusunan anggaran terdapat ruang terjadinya praktek korupsi.

Dalam berita negara Nomor 2054 Tahun 2016 tentang Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa 90% kasus penyimpangan pengadaan barang jasa terkait tahap perencanaan. Hal tersebut menunjukan bahwa korupsi bukan penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau kelalaian namun terkait dengan proses perencanaan.

Beberapa motivasi yang melandasi penelitian ini adalah *pertama*, permasalahan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran merupakan fenomena umum yang terjadi hampir di semua lini pemerintahan. Beberapa penelitian telah mengkaji fenomena tersebut (Yuhertiana, dkk., 2015; Abdullah, 2012; Indriani, dkk., 2019). Hal ini membutuhkan penjelasan dan penelitian empiris lebih lanjut.

Kedua, untuk melihat aspek keprilakuan dalam *fraud* di pemerintahan beberapa penelitian menggunakan *Theory of Planned Behavioral* seperti dalam penelitian (Suryono dan Chariri, 2016; Perdana, dkk., 2018; Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016). Teori tersebut sering dikaitkan dengan *fraud triangle theory*, tetapi untuk penelitian ini penulis mencoba mengkaitkan *Theory of Planned Behavioral* dengan *capability* sebagai unsur ke empat dari *fraud diamond*, untuk mengkaji bagaimana pelaku *fraud* yang memiliki *capability* dalam lingkup perencanaan dan penganggaran melakukan *fraud* dibidang tersebut. Untuk topik dan kombinasi teori ini penulis belum menemukan penelitian yang jauh mendalam menguji hubungan kedua teori dan permasalahan tersebut.

Ketiga, dengan berkembangnya penggunaan sistem informasi maka kegiatan perencanaan dan penganggaran mulai kurun waktu beberapa tahun terakhir ini mulai diarahkan dengan penggunaan sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tetapi dalam perjalanannya tetap saja muncul permasalahan permasalahan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tekanan (tekanan eksternal) berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?
2. Apakah kesempatan (kelemahan sistem informasi) berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?
3. Apakah rasionalisasi (budaya etis organisasi) berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?
4. Apakah *capability* (sikap) berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran
5. Apakah *capability* (norma subjektif) berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran ?
6. Apakah *capability* (kontrol perilaku) berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran ?
7. Apakah niat berbuat *fraud* berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini meliputi :

1. Menganalisis pengaruh tekanan (tekanan eksternal) terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran
2. Menganalisis pengaruh kesempatan (kelemahan sistem informasi) terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

3. Menganalisis pengaruh rasionalisasi (budaya etis organisasi) terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran
4. Menganalisis pengaruh *capability* (sikap) terhadap niat berbuat *faud* dalam perencanaan dan penganggaran
5. Menganalisis pengaruh *capability* (Norma subjektif) terhadap niat berbuat *faud* dalam perencanaan dan penganggaran
6. Menganalisis pengaruh *capability* (kontrol perilaku) terhadap niat berbuat *faud* dalam perencanaan dan penganggaran
7. Menganalisis pengaruh niat terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori *fraud* dalam hal perencanaan dan penganggaran dan menjadi tambahan referensi bagi akademisi untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan implikasi praktis yang berkenaan dengan stakeholder terutama pemerintah dalam hal membuat kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran sehingga dapat meminimalisir *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yakni:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat kajian pustaka, menjabarkan teori yang terkait dan memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis berbasis teori dan pernyataan hipotesis serta kerangka pikir penelitian.

Bab III : Menguraikan metodologi penelitian yang terdiri dari rancangan kegiatan yang akan dilakukan meliputi penjelasan populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian dan pengujian hipotesis.

Bab IV : Menguraikan proses pengujian hipotesis dan analisis data serta penyajian hasil penelitian.

Bab V : Memuat kesimpulan hasil penelitian, kontribusi teori, implikasi praktis keterbatasan, dan saran penelitian selanjutnya.

BAB II
KAJIAN TEORITIS

2.1. Definisi *Fraud*

Fraud dalam pemerintahan seringkali diidentikkan dengan *white collar crime*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan terstruktur yang dilakukan oleh orang-orang berdasi, dan juga sering diarahkan kepada perbuatan melanggar hukum. Zimbelman, dkk., (2014) menjelaskan bahwa *fraud* sebagai istilah umum yang mengacu kepada segala macam cara yang digunakan melalui keahlian/kelihaian tertentu oleh seorang individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan representase yang salah.

The Association of Certified Fraud Examiners memberikan definisi *fraud*, sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (ACFE, 2008). Kecurangan *(fraud)* juga didefinisikan sebagai perbuatan yang mencakup akal muslihat, kelicikan, dan tidak jujur dan cara-cara yang tidak layak/wajar untuk menipu orang lain untuk keuntungan diri sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian dampak yang dapat diakibatkan *fraud* antara lain hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moril karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya (Singleton dan Aaron, 2010).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah tindakan menipu, perbuatan tidak jujur, menimbulkan keuntungan bagi

pribadi/kelompok dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain/organisasi. Dalam penelitian ini, penulis sengaja tidak menerjemahkan *fraud* dengan kecurangan karena istilah ini lebih bersifat umum tetapi menggunakan istilah *fraud* karena istilah ini identik dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime* dimana dalam penjelasan Sutherland dalam monografnya, Tuanakotta (2018) bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan kelas atas terdiri dari orang-orang bisnis dan professional, terhormat dan dihormati. Kejahatan ini dilakukan dalam lingkup jabatan mereka. Hal ini relevan dengan pelaku *fraud* pada perencanaan penganggaran, sehingga penulis memandang istilah ini tepat untuk menggambarkan maksud *fraud* pada konteks penelitian ini.

Davia dan Howard (2000) mengelompokkan *fraud* dalam 3 kelompok yakni

1. *Fraud* yang sudah ada tuntutan hukum *(prosecution)* tanpa memperhatikan bagaimana keputusan pengadilan
2. *Fraud* yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hokum
3. *Fraud* yang belum ditemukan

Berdasarkan pengelompokan tersebut, permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran masuk dalam ketiga kategori *fraud* tersebut. Karena perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian dari proses pengelolaan keuangan yang paling awal maka *fraud* belum dapat dibuktikan sehingga masuk di kategori ke tiga tetapi ada kasus yang sudah dapat langsung dibuktikan di awal sehingga masuk dalam kategori kedua dan ketiga seperti ketika sudah dibuktikan dengan operasi tangkap tangan kasus suap yang biasa dilakukan oleh KPK.

2.2. Fraud Tree

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menjabarkan *fraud* dalam bentuk *fraud tree* (Tuanakotta, 2018). Pertama yakni *Corruption, fraud* jenis ini kebanyakan bekerjasama dengan pihak lain sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Terdiri dari tiga cabang yakni *conficts of interest* atau pertentangan kepentingan, *bribery* yaitu menerima, memberikan dengan tujuan mempengaruhi pembuat keputusan, *illegal gratuities* atau pemberian ilegal dan *economic extortion* atau pemerasan secara ekonomi yang dilakukan secara terselubung maupun secara terbuka.

Bentuk *fraud* selanjutnya adalah *asset misappropriation,* yakni penyalahgunaan aset dimana aset pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau menurut istilah hukum mengambil aset secara illegal, tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut. Terdiri dari beberapa cabang yakni *larceny* pencurian, penjarahan yang berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian intern terutama berkenaan dengan perlindungan aset. *Skimming* penjarahan yang dilakukan sebelum uang secara fisik masuk ke perusahaan dan *fraudulent disbursements* pengeluaran yang sudah masuk di *cash register* seperti pengembalian yang dibuat buat dan pembatalan palsu.

Bentuk *fraud* ketiga adalah *fraudulent statements* yakni biasanya dilakukan oleh individu atau lembaga untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa laporan keuangan. *Fraud* ini terdiri dari dua cabang yakni menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya *(revenue*

overstatements) dan menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya *(revenue understatements).*

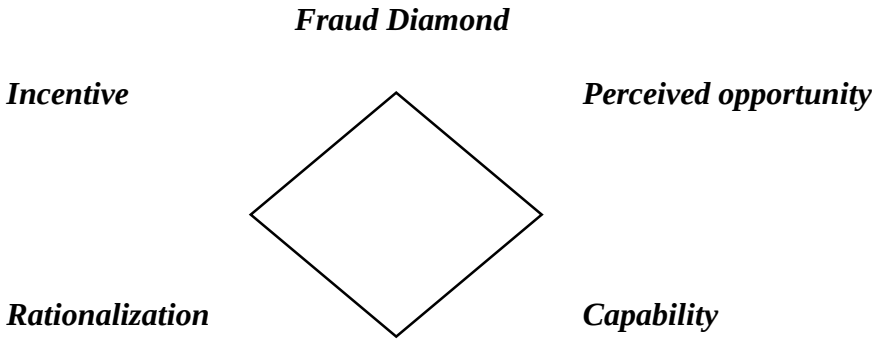
Fraud dalam perencanaan dan penganggaran ini dikategorikan dalam bentuk *corruption*. Dalam *fraud* ini terdapat unsur *conficts of interest* antara legislatif dan eksekutif, *bribery* ketika satu pihak memberikan dan pihak lain menerima untuk merubah suatu keputusan dalam penganggaran, *illegal gratuities* pemerasan untuk memuluskan kepentingan satu pihak tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dijelaskan pula bahwa korupsi meliputi :

1. Mengakibatkan kerugian keuangan Negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Perbuatan pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan
7. Gratifikasi

2.3. Teori *Fraud Diamond (Fraud Diamond Theory)*

Fraud dilakukan dengan berbagai macam motivasi. Salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan hal tersebut adalah *fraud diamond theory* Wolfe dan Hermanson (2004) yang merupakan penyempurnaan dari teori *fraud triangle* Cressy (1953). Selain ketiga faktor yang ada di dalam *fraud triangle* yakni *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (rasionalisasi) juga

ditambahkan faktor kemampuan *(capability)* yang dianggap turut berpengaruh terhadap perilaku *fraud.*



Gambar 2.1. *Fraud Diamond – Wolfe and Hermanson (2004)*

Incentive atau tekanan lebih kepada dorongan mengapa seseorang melakukan kecurangan. Bermula dari suatu tekanan yang menghimpit baik itu dari sisi finansial seperti tuntutan gaya hidup yang melebihi kemampuan, tuntutan hutang yang harus segera diselesaikan karena sudah jatuh tempo maupun kebutuhan yang tidak terduga lainnya berkontribusi dalam hal mengapa orang dapat berbuat *fraud*. Bisa juga berasal dari sifat atau perilaku individu itu sendiri yakni keserakahan. Selain itu ada satu faktor dari luar individu yang sangat sering menjadi penyebab perilaku *fraud* contohnya dalam organisasi pemerintahan yakni tekanan kebutuhan organisasi yang tidak ada dalam pos anggaran sehingga memungkinkan pelaku melakukan berbagai cara melakukan *fraud* untuk memenuhi kebutuhan organisasi tersebut.

Tekanan lain yang turut memicu perilaku *fraud* adalah tekanan dari kebiasaan buruk seperti kebiasaan berjudi, minum minuman beralkohol, obat-obatan terlarang yang memicu orang melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu

ada juga tekanan yang berasal dari pekerjaan seperti tidak adanya kepuasaan seperti kurangnya penghargaan dari pimpinan terhadap hasil kerja, adanya ketidakadilan dalam beban pekerjaan juga memicu orang melakukan *fraud* untuk memperoleh imbalan dari kerja kerasnya.

Opportunity atau kesempatan sering terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap suatu organisasi, sistem pengendalian yang lemah dan tidak efektif, penyalahgunaan wewenang serta kelemahan sistem informasi yang digunakan, kebijakan akuntansi yang kurang tepat. Hal lain yang sering dikaitkan dengan faktor kesempatan adalah lemahnya penegakan hukum dalam hal ini lebih kepada adanya pengertian tentang peraturan perundang undangan yang ada tetapi tidak mematuhinya. Selain itu asimetri informasi juga seringkali diakaitkan dengan hal ini dimana antara *agent* dan *principal* yang memiliki informasi lebih mempergunakan kesempatan untuk melakukan *fraud*.

Rationalization atau Rasionalisasi seringkali dikaitkan dengan pembenaran bahwa *fraud* yang dilakukan adalah sesuatu yang wajar terjadi dan bukan merupakan satu penyimpangan sehingga secara moral hal ini dapat diterima dalam lingkup masyarakat. Pelaku *fraud* berusaha mencari pembenaran perbuatannya agar pelaku tidak merasa ketakutan dengan apa yang diperbuatnya dan dapat menenangkan dirinya sendiri. Selain itu pelaku juga merasa sangat berjasa terhadap organisasi merasa paling dominan sehingga apa yang dilakukannya dianggap wajar atau sepadan dengan jasa yang diberikan kepada organisasi. Rasa iri dan dengki terkadang juga menjadi awal pembenaran bahwa apa yang dilakukan sudah semestinya terjadi apalagi jika dibandingkan dengan perilaku orang lain.

Kemampuan atau *capability* merupakan pembaharuan dari *fraud triangle* dimana *capabilty* ini mengarah kepada kompetensi yang dimiliki oleh pelaku *fraud*. Tapi hal ini tidak sebatas keterampilan yang dimiliki *(skill)* tetapi juga pemahaman seseorang terhadap sistem suatu organisasi, memahami titik lemah dari suatu organisasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi kecurangan. *Capability* atau kapabilitas menjadi suatu ancaman berat dari dalam organisasi apalagi jika dimiliki oleh pimpinan organisasi yang memiliki kekuasaan sehingga sangat mudah melakukan *fraud*. Selain itu jika seseorang memahami bagaimana kelemahan sistem pengendalian suatu perusahaan maka bukan hal yang mustahil *fraud* dapat terjadi apalagi jika dihubungkan dengan faktor lain yang dominan. Faktor ini juga seringkali dikaitkan dengan kejahatan *white collar crime* dimana hal ini mengancam keberadaan organisasi. Kecerdasan pelaku yang mengetahui titik lemah organisasi menjadi ancaman tersendiri bagi sistem yang sudah dibangun.

Elemen elemen dari *capability* menurut Wolfe dan Hermanson (2004) sebagai sifat sifat dari pelaku kecurangan terdiri dari :

1. *Positioning*

   Posisi strategis dalam suatu organisasi akan memberikan kemampuan bagi seseorang sehingga dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Hal ini terkait akses dan otoritas yang dimilikinya.

2. *Intelligence*

   Pemahaman sistem yang ada dalam organisasi, pengetahuan tentang seluk beluk dan kelemahan prosedur yang ada di dalamnya serta akses ke dalam sistem membuat pelaku kecurangan dapat dengan mudah melakukan aksinya

3. *Convidence*/Ego

   Individu ini memiliki keyakinan yang kuat dan kepercayaan diri yang besar bahwa apa yang dilakukan tidak dapat terdeteksi karena kemampuannya. Orang dengan tipe seperti ini sering disebut narsisme atau sangat mencintai diri sendiri. Mereka punya kebutuhan untuk dikagumi dan tidak berempati terhadap orang lain. Mereka percaya bahwa lebih unggul, memiliki kemampuan dan prestasi.

4. *Coercion*

   Pelaku dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya.

5. *Deceit*

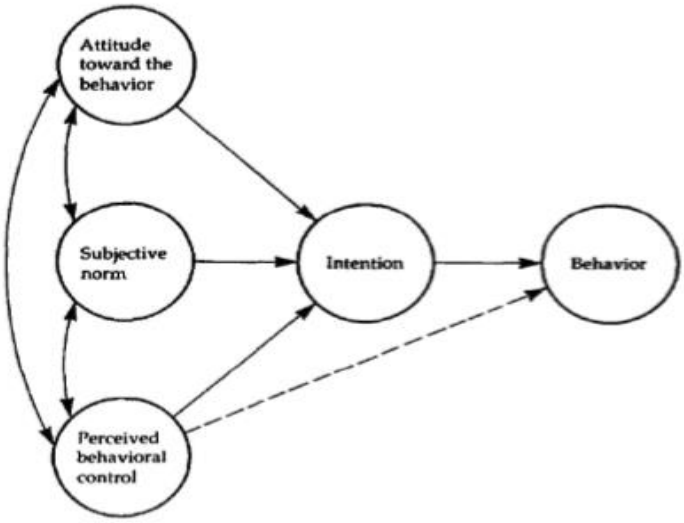
   Individu seperti ini memiliki kemampuan untuk melakukan kebohongan untuk menghindari deteksi dan meyakinkan orang lain bahwa tidak terjadi penyimpangan.

6. *Stress*

   Pelaku dengan tipe ini mampu menyembunyikan stress. Melakukan kecurangan dapat menimbulkan tekanan batin dan emosional tersendiri bagi pelaku tapi tidak bagi individu ini.

2.4. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dimana dalam TRA niat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu *attitude toward behavior* dan *subjective norms.* Dalam TPB ditambahkan faktor *perceived behavioral control (*Ajzen, 1991).



Gambar 2.2. *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991)

Dalam *Theory of Planned Behavior* niat ditentukan oleh tiga variabel yakni :

1. *Attitude toward behavior* (Sikap)

   Sikap merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang yang memberikan penilaian positif atau negatif terhadap suatu hal. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh seseorang mengenai konsekuensi dari perilaku atau *behavioral beliefs* (Ajzen, 2005).

   Mahyarni (2013) menyatakan keyakinan terkait dengan penilaian subjektif seseorang terhadap dunia sekitarnya termasuk pemahaman mengenai diri dan lingkungannya. Keyakinan tersebut dapat diungkapkan dengan menghubungkan satu perilaku yang diprediksi menghasilkan manfaat atau kerugian, jika melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005).

2. *Subjective Norms* (Norma subjektif)

   Norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. Dalam norma subjektif ini keyakinan diperoleh individu dari pandangan orang lain terhadap sikap individu

tersebut (Ajzen, 2005). Hubungan yang dijalin oleh individu disini bersifat vertikal dan horisontal. Hubungan vertikal seperti atasan dengan bawahan, orang tua dengan anaknya. Pola hubungan vertikal seperti ini lebih kepada tuntutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan hubungan horizontal terjadi antara individu dengan yang setara seperti teman dan saudara, sehingga harapan terbentuk secara deskriptif yang cenderung meniru perilaku di sekitarnya (Ramdhani, 2016).

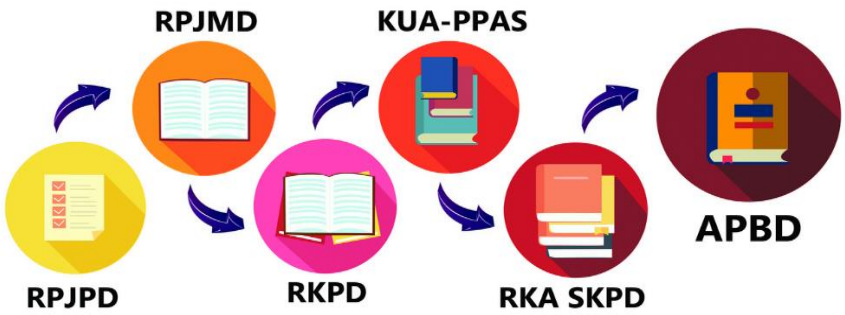
3. *Perceived behavioral* (Kontrol perilaku)

   Kontrol perilaku menurut Ajzen (2005) ditentukan oleh keyakinan individu mengenai tersedianya sumber daya berupa kompetensi, kesempatan yang mendukung atau menghambat perilaku yang diprediksi. Dalam hal ini lebih kepada persepsi hal-hal yang mendukung atau tidak mendukung perilaku tersebut.

2.5. Perencanaan dan penganggaran

Dalam Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan bahwa tujuan dari perencanaan adalah mengejar laju pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas harga, menyediakan peluang kerja bagi rakyat, meratakan hasil pembangunan, meniadakan kemiskinan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan penganggaran lebih mengarah kepada tindakan organisasi yang mengarah pada jangka waktu yang relatif pendek, kegiatan apa yang ingin dicapai, siapa dan berapa banyak sumber daya yang akan digunakan.

Proses perencanaan dan penganggaran dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan daerah selama 20 tahun. Penyusunan RPJMD setiap 5 tahun harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setelah penyusunan RPJMD pemerintah menetapkan RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Berdasarkan RKPD kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD yang dibahas dengan DPRD dan jika disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) setelah itu Pemerintah daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara kemudian Kepala Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman untuk menyusun RKA. Setelah RKA dibuat, disusunlah Rencana Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD. Setelah itu Rancangan Peraturan tersebut dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.



Gambar 2.3. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah
(Sumber: http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

2.5.1 Permasalahan dalam lingkup perencanaan dan penganggaran

Dalam Penelitian sebelumnya permasalahan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran terdiri dari 2 pembahasan utama yakni korupsi politik dan korupsi administrasi (Abdullah, 2012). Ranah penelitian mengenai korupsi politik lebih mengarah kepada perilaku *fraud* legislatif dan eksekutif sedangkan korupsi administrasi mengarah kepada *fraud* pada proses administrasi penyusunan anggaran. Berikut ini adalah permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian terdahulu mengenai perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2.1
Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran

Peneliti	Permasalahan
Abdullah, (2012)	Korupsi dalam proses penyusunan anggaran dimulai dari korupsi secara politik (*Political corruption*) terjadi pada fase penyunan anggaran dimana keputusan politik sangat dominan. Kemudian korupsi administrasi (*administrative corruption*) karena keputusan administrasi lebih dominan. Pada akhirnya korupsi politik akan berakhir dengan korupsi administrasi
Setiawan dkk., (2013)	Penyimpangan pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan anggaran dengan mengusulkan kegiatan yang tidak prioritas
Aristiowati, (2015)	Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda beda sehingga dapat menyebabkan perilaku *fraud*
Razak dkk., (2011)	Keterlambatan pengesahan anggaran menimbulkan penyimpangan dalam bentuk negosiasi atau "main mata'
Yuhertiana dkk., (2015)	Dalam proses perencanaan adanya kecenderungan *markup*
Amri dan Priatmojo, (2012)	Adanya kolusi antara legislatif dan eksekutif atas program program tertentu untuk kepentingan tertentu, mafia anggaran muncul pada proses ini
Sholihah dkk., (2016)	Pola *fraud* pada tahap perencanaan adalah bermain angka dengan mengkondisikan rincian belanja yang mudah di SPJ kan, merencanakan rincian objek belanja yang tidak perlu, mark up harga dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas harga.
Indriani dkk., (2019)	*Fraud* pada penyusunan anggaran terjadi berupa komitmen (fee), pemisahan dana untuk kegiatan non budgeter (tekanan), pemanfaatan celah hukum yang kurang efektif sistem pengawasannya (kesempatan) serta menganggap wajar apa yang dilakukan serta semua Perangkat Daerah melakukan hal yang serupa (rasionalisasi).

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *fraud* dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan *Fraud*

No	Peneliti	Variabel	Teori/ Sampel/Alat/ Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Avianto, dkk., (2018)	**Variabel Independen** • Kekuatan monopoli • Integritas **Variabel Dependen** • Penipuan dalam pengadaan elektronik	• Menggunakan Teori *Fraud diamond, Monopoly power* • 95 responden yang terkait dalam sistem *e-procurement* di empat kabupaten • Metode Kuantitatif • *Software Smart* PLS 3.0	• Kekuatan monopoli memiliki efek positif signifikan pada penipuan pengadaan elektronik • Integritas memiliki efek negative signifikan pada penipuan pengadaan elektronik
2.	Didi, dkk., (2018)	**Variabel Independen** • Keadilan distributif • Keadilan prosedural • Pengendalian internal • Penegakan peraturan • Komitmen organisasi • Budaya organisasi **Variabel dependen** Kecenderungan kecurangan	• Teori *Fraud triangle* • 143 responden di 34 OPD Se Kota Bogor • Metode Kuantitatif • *Software* SPSS 21.0	• Pengendalian internal dan penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungkan kecurangan. • Keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.
3.	Syahria, dkk., (2019)	**Variabel Independen** • ***Tekanan*** Stabilitas keuangan, Tekanan eksternal, Target keuangan • ***Peluang*** Kualitas Auditor • ***Rasionalisasi*** Perubahan auditor • ***Kemampuan*** Perubahan direktur	• Menggunakan teori *Fraud diamond* • 19 perusahaan • Metode Kuantitatif • *Software* SPSS 16	• Stabilitas keuangan (tekanan) dan perubahan auditor eksternal (rasionalisasi) berpengaruh terhadap penipuan laporan keuangan • Tekanan eksternal dan target keuangan (tekanan) kualitas auditor eksternal (peluang) dan perubahan direktur (kemampuan) tidak berpengaruh

		Variabel Dependen Penipuan laporan keuangan		terhadap penipuan laporan keuangan
4.	Tehupuring dan Lingga (2017)	**Variabel Independen** Sistem pengendalian internal **Variabel Moderasi** Moralitas individu **Variabel Dependen** Kecurangan akuntansi	• Menggunakan teori *fraud triangle* • Respondennya adalah sarjana akuntansi UGM • Metode kuantitatif • *Software* Smart PLS 3.0	• Ketika pengendalian intern pemerintah semakin tinggi maka praktek kecurangan semakin rendah • Sebaliknya ketika sistem pengendalian intern rendah kecurangan akuntansi semakin tinggi • Interaksi antara pengendalian intern dan loyalitas tidak mempengaruhi individu melakukan kecurangan akuntansi
5.	Zulaika dan Hadipryitno (2016)	**Variabel Independen** • *Financial pressure* • Sistem *weakness* • Kualitas panitia pengadaan • Norma subyektif • Sikap terhadap perilaku *fraud* • Kontrol perilaku **Variabel Intervening** Niat berbuat *fraud* **Variabel Dependen** *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa	• *Fraud triangle* dan *Theory of Planned Behavior* • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat dan beberapa kantor perwakilan terpilih • Kuantitatif Structural • *Equation model (SEM)-partial least square*	• *Financial pressure* negatif dan tidak signifikan • Sistem dan prosedur pengadaan yang lemah (peluang) berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penyimpangan *fraud* • Kurangnya kualitas panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap penyimpangan *fraud* • Sikap yang mendukung tindakan *fraud* terbukti berpengaruh posistif signifikan terhadap niat untuk berbuat *fraud* • Norma subjektif berpengaruh signifikan positif terhadap niat berbuat *fraud* • *Perceived behavioral control* (Control) berpengaruh signifikan positif terhadap niat untuk berperilaku *fraud* • Niat untuk bertindak *fraud* berpengaruh positif terhadap fraud dalam pengadaan

				barang dan jasa pemerintah
6.	Tehupuring (2018)	**Variabel Independen** Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian **Variabel Dependen** Tingkat korupsi	• *Agency theory* • 31 Provinsi di Indonesia • *Trianggulasi*/Metode campuran • *Ordinary last square* (OLS)	• Pendapat wajar tanpa pengecualian mewakili tata kelola yang baik namun tidak menjamin bahwa lembaga tersebut bebas potensi korupsi. Audit BPK tidak dirancang untuk mendeteksi korupsi, tetapi untuk menentukan keadilan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan • Pendapat wajar tanpa pengecualian tidak secara signifikan berhubungan dengan tingkat korupsi
7.	Yesiariani dan Rahayu,)2017)	**Variabel Independen** • Eksternal pressure • Rationalization • Financial stability, • Financial targets, • Change of auditor, • Personal financial need, • Nature of industry, • Ineffective monitoring dan capability **Variabel Dependen** Finansial statement fraud	• *Fraud diamond theory* • 22 Perusahaan yang terdaftar di BEI • Metode kuantitatif • *Software* SPSS 17	• external pressure dan rationalization terbukti secara signifikan berpengaruh positif • financial stability, financial targets, change of auditor, personal financial need, nature of industry, ineffective monitoring dan capability tidak terbukti terhadap financial statement *fraud*
8.	Othman dkk., (2015)	**Variabel Independen** • Kesadaran karyawan tentang penipuan di sektor publik • Teknik deteksi dan pencegahan penipuan • Penggunaan teknologi	• 150 responden Akuntan dan auditor internal dari sembilan organisasi sektsor publik dan enam institusi pendidikan tinggi di Malaysia • Metode Kuantitatif	• Audit operasional, peningkatan peran komite audit, tinjauan dan perbaikan pengendalian internal, tinjauan tunai, kebijakan pelaporan penipuan, dan kebijakan rotasi staf adalah beberapa mekanisme efektif yang dirasakan oleh auditor internal dan akuntan di sektor publik.

		Variabel Dependen Deteksi dan pencegahan *fraud*		• Dalam hal teknologi penipuan, perlindungan kata sandi, perlindungan virus, pengambilan sampel penemuan dan audit berkelanjutan adalah beberapa perangkat lunak atau teknologi yang sering digunakan dalam pencegahan penipuan sektor publik • Dalam hal mengidentifikasi kesadaran karyawan, perlunya melaporkan dan bertanggung jawab untuk mendeteksi penipuan, ada peningkatan metode pendeteksian kecurangan dalam organisasi
9.	Permana, dkk., (2017)	**Variabel Independen** • Kesesuaian kompensasi • Efektifitas sistem kontrol internal • Budaya etis organisasi **Variabel Dependen** • Penipuan di lembaga pemerintah	• Menggunakan teori *fraud triangle* • Sampel adalah 105 responden di Kantor Perwakilan BPKP Jakarta • Metode kuantitatif • *Software* SPSS 18	• Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan pada instansi pemerintah • Efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan pada instansi pemerintah • Budaya etis organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan dalam pemerintahan
10.	Pradita, dkk., (2019)	**Variabel Independen** • Tekanan eksternal • Ketidakpastian lingkungan • Komitmen manajemen **Variabel Dependen** • Transparansi laporan keuangan	• Menggunakan teori instusional, Isomorfisme institusional • 149 SKPD di D.I. Yogyakarta • Metode campuran (mixed method) • SoftwareSmartPLS versi 2.0	• Implementasi transparansi pelaporan keuangan dalam D.I. Yogyakarta dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan komitmen manajemen

2.7. Perumusan Hipotesis

2.7.1 Tekanan Eksternal Terhadap *Fraud* Perencanaan Penganggaran

Pressure merupakan salah satu unsur utama penyebab *fraud*. Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa tekanan muncul ketika seseorang mempunyai kebutuhan yang mendesak tetapi tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Banyak proksi yang digunakan untuk menjelaskan variabel ini. Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) menggunakan tekanan finansial sebagai proksi yang menjelaskan bagaimana penghasilan yang kurang memadai, pendapatan/honor tidak sebanding dengan risiko dan beban pekerjaan sehingga ini dijadikan pembenaran melakukan *fraud*. Tetapi hasil penelitiannya menyatakan bahwa tekanan finansial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *fraud* dalam proses pengadaan barang jasa. Adelina dan Nadia (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa *financial stability* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*.

Menurut *Statement on Auiditing Standard SAS* nomor 99 dalam Skousen, dkk., (2009), proksi yang dapat menjelaskan mengenai tekanan adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, situasi keuangan pribadi pimpinan dan pemenuhan target keuangan. Schuchter dan Levi (2015) juga menyatakan bahwa tekanan bisa berasal dari luar pelaku atau berasal dari faktor eksternal. Jika dihubungkan dengan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran, tekanan eksternal cukup mewakili kondisi yang ada dalam permasalahan perencanaan dan penganggaran dimana pelaku tidak mengalokasikan anggaran berdasarkan perencanaan yang sudah disusun berdasarkan mekanisme yang ada dari tingkat bawah karena adanya unsur

tekanan dari pihak eksternal misalnya tekanan dari pimpinan, pembatasan anggaran yang diberikan oleh penanggungjawab anggaran dan permintaan langsung dari legislatif. Selain itu kebutuhan organisasi itu sendiri juga menjadi pemicu bagi pelaku melakukan *fraud*. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

2.7.2 Kelemahan Sistem Informasi Terhadap *Fraud* Perencanaan Penganggaran

Unsur *fraud* yang kedua adalah *opportunity*, Beberapa proksi yang sering dikaitkan dengan dengan unsur ini yakni sistem pengendalian internal. (Didi dan Kusuma, 2018; Tehupuring, dkk., 2017) lemahnya sistem dan prosedur Zulaikha dan Hadiprayitno (2016) kurangnya kualitas panitia pengadaan Zulaikha dan Hadiprajitno (2016). Penelitian lain dengan objek sektor privat menggunakan beberapa proksi mewakili faktor kesempatan diantaranya Skousen, dkk., (2009) *Nature of Industry, Ineffective Monitoring* dan *Organizational Structure.*

Tuanakotta (2018) menyatakan bahwa selain tekanan, pelaku *fraud* mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh orang lain dalam hal ini sebagai *perceived opportunity.* Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) menyatakan sistem dan prosedur pengadaan yang lemah berpengaruh signifikan terhadap *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam proses perencanaan dan penganggaran penggunaan sistem informasi seperti *e-budgeting* dan *e-planning* sudah digunakan hampir di seluruh daerah di Indonesia, bahkan beberapa daerah sistem tersebut sudah terintegrasi. Walaupun sudah

menggunakan mekanisme ini, tetapi indikasi *fraud* dalam penyusunan anggaran masih tetap terjadi. Kekurangan dari sistem informasi perencanaan dan penganggaran dapat dimanfaatkan sebagai *perceived opportunity* oleh pelaku untuk melakukan *fraud*. Permasalahan infrastruktur pendukung yang masih kurang memadai, integrasi sistem yang tidak berjalan, masalah konektifitas jaringan di daerah yang tidak stabil menjadi permasalahan utama penggunakaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran, sehingga hal ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk berbuat *fraud*. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis :

H2 : Kelemahan sistem informasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam perencanaan penganggaran

2.7.3 Budaya Etis Organisasi Terhadap *Fraud* pada Perencanaan dan Penganggaran

Variabel ketiga adalah *Rationalization*. Hal ini berkaitan dengan pembenaran pelaku *fraud,* bahwa apa yang dilakukan merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Variabel ini tidak mudah dipahami karena berhubungan dengan pemikiran seseorang atau sekelompok.

Beberapa proksi yang sering dikaitkan dengan variabel ini adalah budaya organisasi (Didi dan Kusuma, 2018; Wulandari dan Zaky, 2014; Najahningrum, 2013), komitmen organisasi (Didi dan Kusuma., 2018; Wulandari dan Zaky, 2014; Najahningrum, 2013), perilaku etis (Permana, 2017; Zulkarnain, 2013) dan penegakan hokum (Wulandari dan Zaky, 2014; Zulkarnain, 2013).

Jika dikaitkan dengan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran, budaya etis organisasi dianggap relevan sebagai proksi mewakili variabel rasionalisasi.

Pramudita (2013) menjelaskan budaya organisasi lebih mengarah kepada nilai, norma, kepercayaan, sikap dan asumsi tentang bagaimana orang orang dalam organisasi berperilaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rae dan Subramaniam (2008) dinyatakan bahwa ketika individu berada di lingkungan yang lebih etis maka individu tersebut akan cenderung melaksanakan aturan yang ada dalam perusahaan dan menghindari tindakan penipuan dalam organisasi, dan sebaliknya jika berada dalam lingkungan dengan budaya etis yang rendah maka mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Dalam kaitannya dengan *fraud* perencanaan dan penganggaran, individu yang berada dalam organisasi dengan budaya etis yang rendah cenderung terdorong untuk membenarkan tindakan berbuat *fraud*. Karena hal tersebut menurutnya adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam lingkungan organisasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

2.7.4 Sikap (*Attitude Toward Behavior*) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Aspek keempat dari teori *fraud diamond* yang merupakan pembaharuan dari *fraud triangle* adalah *capability* (Wolfe dan Hermanson, 2004). Kapabilitas ini sering diartikan sebagai kemampuan atau kompetensi. Namun tidak sebatas skill atau kemampuan saja, tetapi lebih kepada pemahaman atau penguasaan yang detail mengenai seluk beluk organisasi, kelebihan dan kekurangan sistem yang digunakan, pemahaman mengenai sistem pengendalian intern dalam organisasi.

Orang yang memiliki kapabilitas seperti ini menjadi ancaman terbesar ketika melakukan *fraud* terlebih jika didukung dengan posisi strategis dalam organisasi.

Dellaportas (2013) menyatakan bahwa para pelaku *fraud* menggunakan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan yang dimiliki tentang penguasaan sistem dalam suatu organisasi dengan memanipulasi dan memotong pengendalian, sehingga tindakan *fraud* yang dilakukannya tidak dapat terdeteksi.

Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa perilaku manusia dilandasi faktor yang menumbuhkan niat *(intention)* yang berubah menjadi sebuah perilaku (behaviour). Salah satu variabel *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini adalah sikap atau *Attitude Toward Behavior*. Sikap ini terbentuk dari keyakinan akan konsekuensi yang akan diterima dari suatu tindakan. Jika dihubungkan dengan elemen *capability* seperti *convidence, deceit, coercion* individu akan mudah menyembunyikan *fraud* yang dilakukannya, karena pelaku memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mudah melakukan kebohongan dan menyuruh orang lain menyembunyikan perbuatannya. Individu dengan *capability* memiliki keyakinan bahwa *fraud* yang diperbuatnya tidak akan terdeteksi.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran, ketika seseorang memiliki posisi strategis dan penguasaan terhadap sistem dan prosedur yang berlaku dalam penyusunan anggaran ditambah motivasi lain yang mendasarinya dapat menumbuhkan niat dan keyakinan bagi individu untuk berbuat *fraud*. Sehingga dengan keyakinan tersebut pelaku dapat menentukan sikap, melakukan praktek kecurangan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Sikap (*Attitude Toward Behavior)* berpengaruh positif terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

2.7.5 Norma Subjektif (*Subjective Norms*) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Norma subjektif ini adalah bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu berdasarkan harapan dari orang orang disekitarnya (Ramdhani, 2016). Dalam hal ini baik hubungan vertikal seperti hubungan atasan dengan bawahannya atau juga hubungan horisontal seperti dengan rekan setara. Dalam hubungan yang bersifat vertikal, harapan dipersepsikan sebagai tuntutan sehingga norma subjektif didasari oleh motivasi untuk patuh terhadap tuntutan melakukan perilaku. Sebaliknya pada hubungan yang memiliki sifat horizontal akan terbentuk harapan secara deskriptif untuk meniru atau mengikuti perilaku orang disekitarnya.

Jika dihubungkan dengan *capability* sebagai aspek ke empat dari teori *fraud diamond* Wolfe dan Hermanson (2004) Individu yang memiliki kemampuan baik itu pemahaman terhadap sistem, skill individu yang baik, maupun keleluasaan akses yang dimilikinya dapat dengan mudah melakukan *fraud* pada proses perencanaan dan penganggaran. Terlebih jika dikaitkan dengan norma subjektif, berdasarkan hubungan vertikal seperti perintah dari atasan atau berdasarkan hubungan horizontal seperti permintaan langsung dari eksekutif kepada legislatif. Kecenderungan melakukan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran dapat dengan mudah dilakukan oleh individu tersebut dengan menganggarkan sesuatu melebihi harga standar, memecah satu pekerjaan yang besar menjadi beberapa pekerjaan dengan skala kecil untuk memenuhi kepentingan golongan tertentu, melebihkan anggaran kegiatan dari kebutuhan sebenarnya, membuat target

pendapatan yang telalu rendah dari hasil yang sebenarnya atau menganggarkan sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Hal ini tidak akan sulit dilakukan oleh orang yang memiliki *capability* atau kemampuan dengan mempersepsikan apa yang menjadi harapan dari orang orang sekitarnya menjadi motivasi yang besar sehingga menimbulkan niat untuk berbuat *fraud*. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis :

H5: Norma subjektif (*Subjective Norms*) berpengaruh positif terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

2.7.6 *Perceived Behavioral Control* (Kontrol perilaku) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Kontrol perilaku ini berhubungan dengan keyakinan individu akan ketersediaan sumber daya berupa peralatan, kompetibilitas, kompetensi dan kesempatan yang mendukung atau menghambat dalam mewujudkan perilaku (Ajzen, 2005). Semakin kuat individu tersebut meyakini tersedianya sumber daya atau kesempatan maka semakin kuat kontrol individu tersebut terhadap perilakunya.

Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) menyatakan ketika seseorang mempersepsikan bahwa *fraud* mudah dilakukan dan lingkungan juga mendukung persepsinya, maka individu akan mudah mempunyai niat berbuat *fraud* dan selanjutnya akan mewujudkan niat tersebut. Faktor ini dapat disebut *self efficacy beliefs* (keyakinan potensi diri) dari para pelaku yang menjadi niat berbuat *fraud.*

Jika dikaitkan dengan unsur *capability* dalam *fraud diamond* Wolfe dan Hermanson (2004), Individu yang mempunyai persepsi kontrol yang tinggi akan lebih merasa yakin dengan kemampuan *(capability)* yang ada pada dirinya.

Begitupun ketika melakukan *fraud* dalam perencanaan penganggaran. Pelaku akan merasa yakin apa yang dilakukannya tidak akan terdeteksi karena kemampuan dari individu tersebut. Individu seperti ini juga cenderung lebih mengetahui tindakan apa yang perlu diambil pada saat mengalami masalah. Terlebih didukung posisi strategis dalam organisasi dan kontrol perilaku yang rendah sehingga kecenderungan niat untuk melakukan *fraud* dapat terjadi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis:

H6 : *Perceived behavioral control* (Kontrol perilaku) berpengaruh positif terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

2.7.7. Niat Berpengaruh Terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Cohen,dkk., (2010) mengembangkan model penelitian *fraud* melalui niat. Faktor rasionalisasi diproksikan dengan beberapa faktor dari *theory planned behavior* yang mempengaruhi *fraud* melalui niat. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengaitkan *capability* sebagai unsur ke empat dari *fraud diamond,* Wolfe dan Hermanson (2004) dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991) dengan tiga unsur yang ada di dalamnya yakni Sikap (*Attitude Toward Behavior),* Norma subjektif (*Subjective Norms*), Kontrol perilaku (*Perceived behavioral)* terhadap niat seseorang dalam berbuat *fraud.*

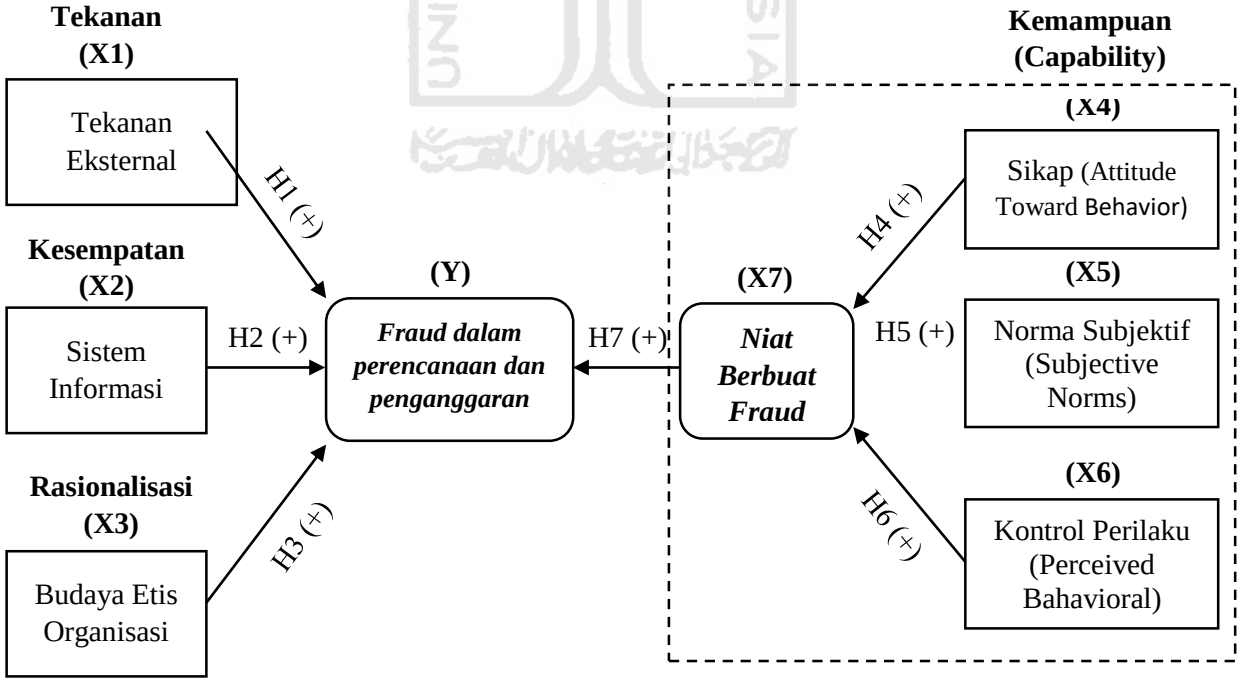
Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) menyatakan variable niat berbuat *fraud (the intention to engage fraud)* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud behavior*. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, berdasarkan *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991) ketiga faktor dalam TPB dapat mempengaruhi perilaku *fraud* melalui niat *(the intention to engage).* Ketika individu sudah

memiliki niat dan didukung dengan *capability* atau kemampuan yang ada maka dapat mendorong pelaku untuk melakukan *fraud*. Untuk itu dapat dirumuskan hipotesis:

H7 : Niat berbuat *fraud* berpengaruh positif terhadap perilaku *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

2.8. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dari penelitian ini menggunakan beberapa proksi yakni tekanan eksternal, kelemahan sistem informasi, budaya etis organisasi, Sikap (*Attitude Toward Behavior)*, Norma subjektif (*Subjective Norms*), Kontrol perilaku *(Perceived behavioral)* terhadap *fraud* dalam perencanaan penganggaran melalui niat berbuat *fraud*.



Gambar 2.4. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor Inspektorat dan bagian perencanaan Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Populasi ini dipilih karena penulis menilai bahwa bagian perencanaan SKPD adalah orang yang mengetahui persis bagaimana tahapan proses perencanaan dari awal hingga tahap pengesahan anggaran selesai, sehingga diharapkan permasalahan dalam proses ini dapat terungkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sedangkan Auditor Inspektorat dipilih karena penulis menilai bahwa mereka benar-benar memahami permasalahan internal yang ada di pemerintahan dari temuan-temuan audit di lapangan. Beberapa tahun terakhir ini Auditor Inspektorat telah mulai mengoptimalkan bentuk-bentuk pendampingan pada proses awal perencanaan dan penganggaran. Karena aktifitasnya yang bersentuhan langsung dengan proses ini bukan hal yang tidak mungkin Auditor Inspektorat turut andil dalam permasalahan yang terjadi pada proses tersebut mengingat Auditor internal dengan level moral yang rendah dapat melakukan kecurangan saat melakukan audit baik terdapat tekanan situasional atau tidak (Puspasari dan Dewi, 2015). Berdasarkan hal tersebut penulis menilai Auditor Inspektorat cukup dapat mewakili individu pelaku *fraud*. Selain itu topik-topik penelitian sejenis masih terbatas menggunakan Auditor Inspektorat sebagai responden penelitiannya.

Objek penelitian *fraud* sangat bervariatif, Othman,dkk., (2015) menggunakan praktisi, pegawai pemerintah dan wakil lembaga pemerintah untuk meneliti *fraud* di Malaysia. Daigle, dkk., (2014) menggunakan mahasiswa sebagai responden untuk menjelaskan perilaku *fraud.* Akkeren dan Buckby (2017) menggunakan Akuntan Forensik sebagai responden untuk melihat faktor terjadinya *fraud*. Untuk melihat motivasi pelaku yang melakukan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) menggunakan auditor BPK sebagai responden penelitiannya.

Proses *sampling* penelitian ini menggunakan *purposive sampling method,* yakni sampel yang dipilih dengan kriteria tertentu. Untuk Auditor Inspektorat menggunakan kriteria :

1. Auditor dengan minimal jenjang karir sebagai auditor pelaksana
2. Sudah mengikuti diklat fungsional auditor tingkat terampil
3. Sudah pernah melaksanakan audit di wilayah kerjanya masing masing.

Untuk bagian perencanaan menggunakan kriteria:

1. Sudah bertugas di bagian perencanaan minimal 1 tahun
2. Sudah pernah melakukan proses perencanaan SKPD
3. Sudah pernah terlibat dalam proses pembahasan anggaran dengan pihak legislatif.

Metode penentuan sampel ini dipilih karena jumlah populasi relatif besar, menggabungkan unsur Auditor Inspektorat dengan bagian perencanaan Provinsi/Kabupaten/Kota serta keterbatasan penulis dalam menjangkau seluruh populasi. Pemilihan responden dengan kriteria tersebut dilakukan dengan asumsi

bahwa auditor dan bagian perencanaan berdasarkan kriteria di atas, dalam hal kompetensi, jenjang karir dan pengalaman, telah benar benar memahami permasalahan di lapangan mengenai *fraud* dalam perencanaan penganggaran, dan diharapkan dapat memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang ditemui di wilayah kerjanya masing masing.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari responden menggunakan kuesioner langsung untuk menjangkau responden di daerah Yogyakarta dan kuesioner *online* berupa *link google form* yang disebar ke komunitas Auditor Inspektorat dan komunitas *Planner* di berbagai Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia.

Responden diberikan beberapa pertanyaan yang terdiri dari delapan bagian, disusun secara runtut dan terstruktur oleh penulis untuk diisi oleh masing-masing responden sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk mengukur jawaban responden penulis menggunakan skala *Likert* untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Skala *Likert* mulai dari angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Agak Tidak Setuju (ATS), angka 4 untuk Agak Setuju (AS), angka 5 untuk Setuju (S), dan angka 6 untuk Sangat Setuju (SS).

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Tekanan (Tekanan Eksternal)

Tekanan eksternal adalah sejauh mana tekanan yang berasal dari luar individu dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berbuat *fraud*. Dalam hal ini bagaimana persepsi responden melihat adanya tekanan dari luar individu membuat

individu tersebut melakukan *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan beberapa indikator (Nay, 2011; Martantya dan Daljono, 2013)

1. Peraturan dalam organisasi
2. Budaya birokrasi dan organisasi
3. Tuntutan langsung pemangku kepentingan
4. Tekanan atas kepentingan organisasi

Variabel ini diukur dengan menggunakan kombinasi pertanyaan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016; Ridha, M. A. dan Basuki, 2019) dengan beberapa penyesuaian berkaitan dengan topik penelitian ini.

Tabel 3.1
Item pertanyaan untuk mengukur variabel tekanan eksternal.

Faktor	**Item Pertanyaan**	**Referensi**
Tekanan (Tekanan Eksternal)	Adanya pembatasan jumlah anggaran untuk masing-masing organisasi membuat organisasi tidak konsisten dengan perencanaan yang sudah dibuat	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016) Ridha, M. A. dan Basuki, (2019)
	Ada kecenderungan pimpinan memberikan arahan untuk menganggarkan kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan	
	Ada kecenderungan pihak legislatif meminta badan anggaran pemerintah daerah untuk memasukkan atau menghilangkan anggaran tertentu yang tidak ada perencanaannya	
	Adanya kebutuhan organisasi yang tidak bisa dianggarkan menyebabkan organisasi menyiasati dengan memasukkan kebutuhan tersebut kedalam anggaran lain dengan jumlah yang lebih besar	

3.3.2 Kesempatan (Kelemahan Sistem Informasi)

Sistem informasi adalah rangkaian prosedur menggunakan sistem komputerisasi yang dirancang untuk mempermudah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Sejauh ini bagaimana responden melihat kelemahan sistem informasi yang digunakan menjadi celah terjadinya *fraud*. Adapun indikator variabel sistem informasi pada penelitian ini merupakan indikator yang dikembangkan dari penelitian Aryaksa dan Kiswanto (2014) yakni :

1. Ketersediaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran
2. Sistem informasi yang sudah memadai sesuai dengan kebutuhan
3. Akses ke sistem informasi perencanaan dan penganggaran
4. Pemanfaatan fasilitas sistem informasi perencanaan dan penganggaran

Berikut tabel yang menyajikan item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kelemahan sistem informasi.

Tabel 3.2.
Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Kelemahan Sistem Informasi

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Kesempatan (Kelemahan Sistem Informasi)	Sistem informasi yang digunakan masih terbatas untuk satu mekanisme saja yakni sistem informasi perencanaan di bagian perencanaan dan sistem informasi penganggaran di bagian keuangan	Aryaksa dan Kiswanto (2014)
	Berbagai kendala teknis menyebabkan belum sinkronnya perencanaan dan penganggaran	Heriawati, (2018)
	Terbatasnya akses ke masing-masing sistem informasi menyebabkan evaluasi hasil perencanaan ke penganggaran sulit dilakukan	
	Tidak sinkronnya sistem perencanaan dan penganggaran menjadi celah terjadinya *fraud* (kecurangan)	

3.3.3 Rasionalisasi (Budaya Etis Organisasi)

Budaya etis organisasi dalam hal ini menyangkut budaya/kebiasaan etis organisasi yang dapat mempengaruhi individu dalam bebuat dan pertindak dalam organisasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sejauh mana responden melihat budaya etis yang berlaku dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi individu individu di dalam organisasi tersebut untuk berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 indikator yang dikembangkan oleh Najahningrum, (2013) dengan beberapa penyesuaian dengan penelitian ini yakni :

1. Model peran yang *visible*
2. Komunikasi harapan-harapan etis
3. Pelatihan etis
4. Hukuman bagi tindakan etis
5. Mekanisme perlindungan etika

Tabel berikut menyajikan item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel budaya etis organisasi.

Tabel 3.3.
Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Budaya Etis Organisasi

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Rasionalisasi (Budaya Etis organisasi)	Arahan pimpinan dalam organisasi menjadi acuan dalam melaksanakan aktifitas organisasi	Najahningrum, (2013)
	Dalam organisasi terdapat kode etik yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etis tetapi seringkali tidak dipatuhi oleh individu dalam organisasi tersebut	
	Seminar dan pelatihan etis mengenai standar tuntutan organisasi, yang menjelaskan praktik yang tidak	

	diperbolehkan sering dilaksanakan tetapi hal ini sulit diimplementasikan dalam organisasi	
	Ada indikasi tidak semua perilaku tidak etis dalam organisasi pemerintah diberi sanksi	
	lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor tidak sampai ke masalah etis dalam organisasi terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran	

3.3.4 Sikap (*Attitude Toward Behavior)*

Sikap dalam konteks ini adalah bagaimana responden melihat individu yang memiliki kapabilitas memiliki keyakinan yang kuat bahwa apa yang dilakukannya tidak dapat terdeteksi karena kemampuan yang dimilikinya baik itu *intellegence* maupun *positioning* yang kuat dalam organisasi sehingga ia dapat dengan leluasa melakukan *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sikap (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016; Ramdhani, 2016) yang telah disesuaikan dengan penelitian ini yakni :

1. Kognitif
2. Afektif
3. Behavioral
4. Keyakinan

Tabel berikut Menyajikan item pertanyaan untuk mengukur variabel sikap (*Attitude Toward Behavior)*

Tabel 3.4.
Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Sikap (Attitude Toward Behavior)

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Capability (Sikap)	Individu yang memiliki *capability* (kemampuan) seringkali berasumsi bahwa *fraud* (kecurangan) yang diperbuatnya minim risiko	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016)
	Ada persepsi bahwa menyiasati perencanaan dan penganggaran adalah hal yang lumrah terjadi dalam organisasi	
	Perilaku menaikkan rincian belanja dari kebutuhan sebenarnya adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran	
	Sikap percaya diri dengan kemampuan dan posisi strategisnya dalam organisasi sering menjadi pembenaran, bahwa *fraud* (kecurangan) yang dilakukan tidak akan terdeteksi	

3.3.5. Norma Subjektif *(Subjective Norm)*

Norma subjektif dalam penelitian ini adalah bagaimana responden melihat seseorang yang memiliki *capability* berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran karena dipengaruhi oleh pihak lain dalam lingkungannya. Dalam hal ini norma subjektif individu menjadi *personality* dan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud*. Indikator penelitian tercermin dari pertanyaan kuisioner yang dikembangkan (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016; Ramdhani, 2016) yakni :

1. Kebiasaan penyimpangan di lingkup organisasi
2. Penerimaan penyimpangan
3. Menerjemahkan keinginan dari pihak lain
4. Motivasi untuk patuh
5. Keyakinan normative

Tabel 3.5.
Item Pertanyaan untuk mengukur variabel norma subjektif

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Capability (Norma Subjektif)	Ada persepsi bahwa *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat ditolerir dalam organisasi	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016)
	Ada persepsi bahwa adalah hal yang wajar/biasa terjadi apabila ada pihak-pihak tertentu yang memberikan gratifikasi untuk memuluskan kepentingannya dalam proses anggaran	
	Sedikit melanggar aturan dan menyimpang dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat diterima	
	Ada indikasi pihak legislatif mengarahkan panitia anggaran memasukkan program yang tidak ada dalam perencanaan sebelumnya dan hal tersebut sepengetahuan/seijin atasan	
	Ada persepsi bahwa untuk memuluskan suatu tujuan untuk kepentingan pribadi maupun organisasi diperlukan pengorbanan finansial terlebih dahulu	

3.3.6 Kontrol Perilaku *(Perceived Control Behavior)*

Kontrol perilaku yang dimaksudkan disini adalah sejauh mana responden melihat individu memiliki kontrol atas dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan *fraud*. Individu yang memiliki *capability* akan memiliki persepsi bahwa *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran akan mudah dilakukan karena *intelligence, positioning, confidence* serta kemampuan lain yang ada pada dirinya memunculkan niat untuk berbuat *fraud*.

Variabel ini diukur menggunakan indikator yang tercermin dari pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016 ; Ramdhani, 2016) dengan beberapa penyesuaian :

1. Kemampuan mengontrol perilaku
2. Upaya untuk mencapai tujuan
3. Menjaga kerahasiaan organisasi

4. Hubungan yang dinamis

5. Kesempatan dan ketersediaan sumber daya

Tabel 3.6.
Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Kontrol Perilaku

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Capability (Kontrol Perilaku)	Karena perilaku ingin menguasai, orang-orang tertentu yang memiliki *capability* (kemampuan) berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016) Ramdhani, (2016)
	Ada indikasi orang orang yang memiliki *capability* (kemampuan) dalam organisasi, cenderung berusaha mencapai tujuan dengan cara cara tertentu walaupun hal tersebut tidak dibenarkan	
	Kesempatan berada dalam posisi strategis dalam organisasi dipergunakan oleh individu dengan *capability* (kemampuan) untuk melakukan *fraud* (kecurangan) pada proses perencanaan dan penganggaran	
	Transparansi dokumen perencanaan seringkali dipergunakan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan *fraud* (kecurangan) dalam proses tersebut	
	Ada indikasi terjadi kerja sama antara badan anggaran legislatif dengan panitia anggaran di pihak eksekutif dalam memasukkan program program tertentu yang tidak direncanakan sebelumnya dan hal ini merupakan hal yang biasa terjadi	

3.3.7 Niat *(Intention to Engage Fraud)*

Niat dalam konteks penelitian ini lebih mengarah kepada aspek kognitif dan afektif dari individu yang memiliki *capability* sehingga memunculkan tindakan berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dipersepsikan oleh responden. Variabel ini diukur dengan beberapa indikator penelitian yang tercermin dari pertanyaan kuisioner dikembangkan dari penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) dengan beberapa penyesuaian yakni :

1. Niat berperilaku

2. Rencana dengan pihak lain

3. Menutupi kecurangan secara formal

4. Memahami celah organisasi

Tabel 3.7.
Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Niat

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Niat	Ada indikasi bahwa perilaku *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan niat untuk memuluskan kepentingan diri sendiri atau orang lain	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016)
	Untuk melakukan fraud dalam perencanaan dan penganggaran pelaku sudah merencanakannya dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses ini	
	Ada indikasi bahwa para pelaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran melaksanakan niatnya dengan menutupi kecurangan secara formal sesuai peraturan yang kadang substansinya berbeda	
	Pelaku benar benar memahami celah dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga untuk merealisasikan niatnya, pelaku dapat dengan mudah menjalankan aksinya.	

3.3.8 *Fraud* Dalam Perencanaan Penganggaran

Fraud dalam perencanaan penganggaran merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, dimana merupakan perbuatan yang menipu, tidak jujur, melanggar hukum dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain maupun lembaga yang berakibat pada kerugian negara. Untuk mengukur variabel ini digunakan pertanyaan sebagai indikator penyimpangan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran yang dipersepsikan oleh responden. Indikator tercermin dalam kuisioner yang dikembangkan dari penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) yakni:

1. Penyimpangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain

2. Penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif/legislatif
3. Gratifikasi kepada panitia anggaran dan badan anggaran
4. Program kegiatan yang tidak melalui perencanaan
5. Markup biaya dan markdown pendapatan dalam anggaran
6. RPJMD/Renstra tidak menjadi acuan penganggaran
7. Tidak adanya transparansi dalam penyusunan anggaran
8. Makelar anggaran

Tabel 3.8.
Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel *Fraud*

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
fraud	Tindakan kecurangan yang Bapak/Ibu ketahui dilakukan oleh orang dalam organisasi dengan sengaja untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016)
	Bapak/Ibu mengetahui *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran juga dilakukan oleh pihak legislatif atau pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain	
	Ada pihak-pihak tertentu memberikan gratifikasi kepada panitia atau badan anggaran untuk meloloskan kepentingannya	
	Beberapa program/kegiatan yang dianggarkan tidak melalui mekanisme perencanaan	
	Anggaran selalu didesain defisit dan penerimaan dihitung rendah sehingga berpotensi inefisiensi dan korupsi	
	Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD tidak dijadikan acuan dalam menyusun RKPD/Renja SKPD dan hal ini dilakukan untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu	
	Tidak adanya transparansi dalam penyusunan anggaran menyebabkan sulitnya melakukan kontrol terhadap anggaran berdasarkan perencanaan yang ada	
	Tahap penganggaran merupakan tahapan yang paling rawan terjadi *fraud* (kecurangan). Dalam tahapan ini muncul orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindakan untuk memuluskan kepentingannya.	

4.3 Teknik Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini data akan dianalisis melalui dua cara yaitu analisis deskriptif serta analisis kuantitatif. Analisis yang bersifat deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik responden dan mendeskripsikan variabel, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam melakukan teknik analisis data ini penulis menggunakan bantuan *software Smart-PLS.*

3.5 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan dua model pengujian yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Pada model pengukuran (*outer model*) dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas data, sedangkan pada model struktural (*inner model*) pengujian dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel (evaluasi *Collinearity Assessment*), nilai koefisien determinasi (R2), dan nilai signifikansi (uji-t).

4.5.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. Uji Validitas

Uji validitas berkaitan dengan ketepatan alat ukur yang digunakan terhadap konsep yang diukur. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur (Ghozali, 2009). Dalam hal ini dimaksudkan untuk memastikan kemampuan suatu skala terhadap

konsep yang dimaksud. Dalam penelitian ini, pengujian validitas yang dilakukan melalui uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Fornell dan Larcker (1981) menyatakan bahwa validitas konvergen dapat dipenuhi apabila nilai *Average Variance Expected (AVE)* lebih dari 0.5, dengan nilai loading untuk setiap item juga lebih dari 0.5. sedangkan validitas diskriminan dapat dipenuhi apabila akar pangkat dua dari AVE untuk setiap variabel lebih besar dari korelasi terbesar antara variabel tersebut dengan variabel lainnya.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi, akurasi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Dalam hal ini reliabilitas dapat digunakan untuk menetapkan apakah instrumen dapat digunakan lebih dari satu kali paling tidak pada responden yang sama sehingga menghasilkan data yang konsisten. Suatu kuisioner dapat dinyatakan reliabel atau andal jika seseorang memberikan jawaban yang konsisten terhadap suatu pernyataan dan dari waktu kewaktu cenderung stabil. Dengan menggunakan metode *composite reliability* pada penelitian ini, reliabilitas dapat diuji yakni dengan melihat nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 Ghozali (2011), tetapi dengan pendekatan eksplanatori dengan nilai 0,6 masih dapat diterima (Ghozali, 2015).

4.5.2 Model Struktural (*Inner Model*)

a. Uji *Collinearity Assessment* (Hubungan Antar Variabel)

Collinearity adalah istilah untuk menggambarkan sebuah korelasi antar variabel *latent* dalam model, kekuatan prediksinya tidak handal dan tidak stabil. Kolinearitas tinggi dapat menyebabkan kesalahan dalam melakukan estimasi bobot

(*weight estimation*) dan kesalahan terhadap penilai signifikansi. Penilaian *collinearity* pada formatif konstruk dilakukan melalui perhitungan Toleransi (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Indikator terjadinya *collinearity* adalah apabila nilai VIF > 5, maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model pengukuran.

b. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai yang mendekati angka 1 berarti bahwa variabel-variabel independen tersebut memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai koefisien determinasi kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas.

c. Uji Signifikansi (Uji-t)

Uji signifikansi (Uji-t) dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh secara individual masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi 0.05. Ghozali menjelaskan bahwa apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka hipotesa yang telah dibuat sebelumnya dapat diterima atau terbukti signifikan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian mengenai perilaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil pengolahan data kuisioner. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Hasil penelitian yang diuraikan dalam bab ini meliputi 1) deskripsi responden melalui data kuisioner yang dikumpulkan; 2) hasil evaluasi model pengukuran (*outer model*) berupa uji kualitas data (validitas dan reliabilitas); 3) hasil evaluasi model struktural (*inner model*) berupa uji *collinearity* (*inner VIF values*), uji *coefficient determinant* (*r-square*), dan uji *significant* (uji-t).

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian ini adalah bagian perencanaan SKPD pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang merupakan pelaksana perencanaan di setiap SKPD dan Auditor Inspektorat pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang turut melakukan pendampingan dan pengawasan pada proses tersebut. Total responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 161 orang, 93 orang merupakan pegawai bagian perencanaan SKPD dan 68 orang merupakan Auditor Inspektorat, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Posisi

Posisi	Jumlah responden	Presentase
Perencana	93	58 %
Auditor	68	42 %
Jumlah	**161**	**100 %**

Sumber : Data diolah

Dari data yang dikumpulkan, responden yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari beberapa wilayah/daerah dengan sebaran wilayah yakni pulau Jawa (50%), Sulawesi (38%), Sumatera (3%), Kalimantan (2%), Ternate (2%), Nusa Tenggara (1%), dan beberapa daerah lainnya (4%).

Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Jumlah responden	Presentase
Jawa	81	50 %
Sumatra	4	3 %
Kalimantan	3	2 %
Sulawesi	61	38 %
Nusa tenggara	2	1 %
Ternate	3	2 %
Lainnya	7	4 %
Jumlah	**161**	**100 %**

Sumber : Data diolah

Adapun teknik penyebaran kuesioner penelitian ini dilakukan melalui 2 cara yaitu penyebaran kuisioner *online* dengan menggunakan bantuan *Google Form* yang disebarkan melalui aplikasi whatsapp dan juga melalui *email* setiap responden, serta dengan secara langsung membagikan angket/kuisioner kepada responden di setiap SKPD yang ada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tabel 4.3. menunjukkan data sebaran kuesioner langsung.

Tabel 4.3
Data Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Hard Copy	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	28	28 %
Kuesioner yang kembali	72	72 %
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	5	5 %
Kuesioner yang memenuhi syarat	67	67%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, kuesioner yang memenuhi syarat untuk dianalisis sebanyak 64,4 %. Dari kuesioner *online* sebanyak 94 kuesioner dan kuesioner langsung sebanyak 67 kuesioner. Adapun kuesioner yang kembali dan tidak memenuhi syarat sebanyak 2 %, kuesioner yang tidak kembali 33,6 % dari total 250 kuesioner yang disebar.

4.2 Deskripsi Responden

Berdasarkan jenis kelamin, responden pada penelitian ini terbanyak adalah perempuan dengan presentase 57 % dan untuk responden laki laki sebanyak 43 %. Hal ini diuraikan pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah responden	Presentase
Laki Laki	69	43 %
Perempuan	92	57 %
Jumlah	**161**	**100 %**

Sumber : Data diolah

Dari total 161 responden, *range* usia terbanyak adalah usia 31 - 40 tahun dengan persentase sebanyak 43% (70 responden), kemudian responden dengan usia

41 - 50 tahun sebanyak 37% (59 responden), responden dengan usia 51 - 60 tahun sebanyak 11% (17 responden), dan responden dengan usia termuda 21 - 30 tahun sebanyak 9% (15 responden) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah responden	Presentase
2 - 30 tahun	15	9 %
31 - 40 tahun	70	43 %
41 - 50 tahun	59	37 %
51 - 60 tahun	17	11 %
Jumlah	**161**	**100 %**

Sumber : Data diolah

Berdasarkan jenjang pendidikan, sebaran responden terdiri atas jenjang Diploma (D3) sebanyak 7 orang (4,4%), Sarjana (S1) sebanyak 102 orang (63%), Magister (S2) sebanyak 51 orang (32%), dan jenjang Doktor (S3) sebanyak 1 orang (0,6%), sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah responden	Presentase
Diploma	7	4,4 %
Sarjana	102	63 %
Magister	51	32 %
Doktor	1	0,6 %
Jumlah	**161**	**100 %**

Sumber : Data diolah

4.2. Hasil Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Untuk mengetahui apakah instrumen dari suatu kuesioner itu valid dan reliabel terhadap variabel yang diukur maka diperlukan uji kualitas data dalam

bentuk uji validitas dan reliabilitas. Ghozali dan Latan (2015) menyatakan bahwa *Outer model* dengan indikator refleksif dievaluasi melalui validitas konvergen dan diskriminant dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *cronbach alfa* untuk blok indikatornya. Sedangkan *outer model* dengan indikator formatif dievaluasi melalui *substantive content*-nya yaitu dengan membandingkan besarnya *relative weight* dan melihat signifikansi dari indikator konstruk tersebut.

4.2.1 Hasil Uji Validitas Data

1. Uji Validitas Konvergen

Untuk menguji validitas konvergen dalam penelitian ini digunakan ukuran *loading faktor* dengan menampilkan nilai item *loading* dan nilai *Average Variance Expected (AVE)* awal dan akhir, dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.7
Nilai *Item Loading* dan Nilai *Average Variance Expected* (AVE) Awal

Variabel	Item	Kode	Loading	AVE
Tekanan (TE)	Adanya pembatasan jumlah anggaran untuk masing-masing organisasi membuat organisasi tidak konsisten dengan perencanaan yang sudah dibuat	TE1	0.584	**0.573**
	Ada kecenderungan pimpinan memberikan arahan untuk menganggarkan kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan	TE2	0.787	
	Ada kecenderungan pihak legislatif meminta badan anggaran pemerintah daerah untuk memasukkan atau menghilangkan anggaran tertentu yang tidak ada perencanaannya.	TE3	0.854	
	Adanya kebutuhan organisasi yang tidak bisa dianggarkan menyebabkan organisasi menyiasati dengan memasukkan kebutuhan tersebut kedalam anggaran lain dengan jumlah yang lebih besar	TE4	0.777	
Kesempatan/ Kelemahan Sistem Informasi (KS)	Sistem informasi yang digunakan masih terbatas untuk satu mekanisme saja yakni sistem informasi perencanaan di bagian perencanaan dan sistem informasi penganggaran di bagian keuangan	KS1	0.716	**0.708**
	Berbagai kendala teknis menyebabkan belum sinkronnya perencanaan dan penganggaran	KS2	0.880	

	Terbatasnya akses ke masing-masing sistem informasi menyebabkan evaluasi hasil perencanaan ke penganggaran sulit dilakukan	KS3	0.909	
	Tidak sinkronnya sistem perencanaan dan penganggaran menjadi celah terjadinya *fraud* (kecurangan)	KS4	0.849	
Rasionalisasi / Budaya Etis Organisasi (RS)	Arahan Pimpinan dalam organisasi menjadi acuan dalam melaksanakan aktivitas organisasi	RS1	0.474	
	Dalam organisasi terdapat kode etik yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etis tetapi seringkali tidak dipatuhi oleh individu dalam organisasi tersebut	RS2	0.829	**0.628**
	Seminar dan pelatihan etis mengenai standar tuntutan organisasi, yang menjelaskan praktik yang tidak diperbolehkan sering dilaksanakan tetapi sulit diimplementasikan dalam organisasi	RS3	0.895	
	Ada indikasi tidak semua perilaku tidak etis dalam organisasi pemerintah diberi sanksi	RS4	0.885	
	Lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor tidak sampai ke masalah etis dalam organisasi terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran	RS5	0.802	
Capability/ Sikap Terhadap Perilaku *Fraud* (CS)	Individu yang memiliki *capability* (kemampuan) seringkali berasumsi bahwa *fraud* (kecurangan) yang diperbuatnya minim risiko	CS1	0.822	**0.754**
	Ada persepsi bahwa menyiasati perencanaan dan penganggaran adalah hal yang lumrah terjadi dalam organisasi	CS2	0.875	
	Perilaku menaikkan rincian belanja dari kebutuhan sebenarnya adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran	CS3	0.872	
	Sikap percaya diri dengan kemampuan dan posisi strategisnya dalam organisasi sering menjadi pembenaran, bahwa *fraud* (kecurangan) yang dilakukan tidak akan terdeteksi	CS4	0.902	
Capability/ Norma Subjektif (CN)	Ada persepsi bahwa *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat ditolerir dalam organisasi	CN1	0.846	**0.751**
	Ada persepsi bahwa adalah hal yang wajar/biasa terjadi apabila ada pihak-pihak tertentu yang memberikan gratifikasi untuk memuluskan kepentingannya dalam proses anggaran	CN2	0.917	
	Sedikit melanggar aturan dan menyimpang dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat diterima	CN3	0.855	
	Ada indikasi pihak legislatif mengarahkan panitia anggaran memasukkan program yang tidak ada dalam perencanaan sebelumnya dan hal tersebut sepengetahuan/seijin atasan	CN4	0.862	
	Ada persepsi bahwa untuk memuluskan suatu tujuan untuk kepentingan pribadi maupun organisasi diperlukan pengorbanan finansial terlebih dahulu	CN5	0.853	
Capability/ Kontrol Perilaku	Karena perilaku ingin menguasai, orang-orang tertentu yang memiliki *capability* (kemampuan) berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran	CK1	0.900	**0.759**

(CK)	Ada indikasi orang orang yang memiliki *capability* (kemampuan) dalam organisasi, cenderung berusaha mencapai tujuan dengan cara cara tertentu walaupun hal tersebut tidak dibenarkan	CK2	0.898	
	Kesempatan berada dalam posisi strategis dalam organisasi dipergunakan oleh individu dengan *capability* (kemampuan) untuk melakukan *fraud* (kecurangan) pada proses perencanaan dan penganggaran	CK3	0.910	
	Transparansi dokumen perencanaan seringkali dipergunakan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan *fraud* (kecurangan) dalam proses tersebut	CK4	0.812	
	Ada indikasi terjadi kerja sama antara badan anggaran legislatif dengan panitia anggaran di pihak eksekutif dalam memasukkan program program tertentu yang tidak direncanakan sebelumnya dan hal ini merupakan hal yang biasa terjadi	CK5	0.831	
Niat Berbuat *Fraud* (NF)	Ada indikasi bahwa perilaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan niat untuk memuluskan kepentingan diri sendiri atau orang lain	NF1	0.909	**0.879**
	Untuk melakukan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran pelaku sudah merencanakannya dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses ini	NF2	0.939	
	Ada indikasi bahwa para pelaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran melaksanakan niatnya dengan menutupi kecurangan secara formal sesuai peraturan yang kadang substansinya berbeda	NF3	0.956	
	Pelaku benar benar memahami celah dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga untuk merealisasikan niatnya, pelaku dapat dengan mudah menjalankan aksinya.	NF4	0.947	
Fraud/ Kecurangan (FR)	Tindakan kecurangan yang Bapak/Ibu ketahui dilakukan oleh orang dalam organisasi dengan sengaja untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain	FR1	0.861	**0.668**
	Bapak/Ibu mengetahui *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran juga dilakukan oleh pihak legislatif atau pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain	FR2	0.867	
	Ada pihak-pihak tertentu memberikan gratifikasi kepada panitia atau badan anggaran untuk meloloskan kepentingannya	FR3	0.881	
	Beberapa program/kegiatan yang dianggarkan tidak melalui mekanisme perencanaan	FR4	0.894	
	Anggaran selalu didesain defisit dan penerimaan dihitung rendah sehingga berpotensi inefisiensi dan korupsi	FR5	0.794	
	Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD tidak dijadikan acuan dalam menyusun RKPD/Renja SKPD dan hal ini dilakukan untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu	FR6	0.827	

	Tidak adanya transparansi dalam penyusunan anggaran menyebabkan sulitnya melakukan kontrol terhadap anggaran berdasarkan perencanaan yang ada	FR7	0.640	
	Tahap penganggaran merupakan tahapan yang paling rawan terjadi *fraud* (kecurangan). Dalam tahapan ini muncul orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindakan untuk memuluskan kepentingannya	FR8	0.743	

Sumber: Data diolah

Tabel 4.8
Nilai *Item Loading* dan Nilai *Average Variance Expected* (AVE) Akhir

Variabel	Item	Kode	Loading	AVE
Tekanan (TE)	Ada kecenderungan pimpinan memberikan arahan untuk menganggarkan kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan	TE2	0.790	**0.661**
	Ada kecenderungan pihak legislatif meminta badan anggaran pemerintah daerah untuk memasukkan atau menghilangkan anggaran tertentu yang tidak ada perencanaannya.	TE3	0.855	
	Adanya kebutuhan organisasi yang tidak bisa dianggarkan menyebabkan organisasi menyiasati dengan memasukkan kebutuhan tersebut kedalam anggaran lain dengan jumlah yang lebih besar	TE4	0.793	
Kesempatan/ Kelemahan Sistem Informasi (KS)	Berbagai kendala teknis menyebabkan belum sinkronnya perencanaan dan penganggaran	KS2	0.896	**0.800**
	Terbatasnya akses ke masing-masing sistem informasi menyebabkan evaluasi hasil perencanaan ke penganggaran sulit dilakukan	KS3	0.906	
	Tidak sinkronnya sistem perencanaan dan penganggaran menjadi celah terjadinya *fraud* (kecurangan)	KS4	0.881	
Rasionalisasi/ Budaya Etis Organisasi (RS)	Dalam organisasi terdapat kode etik yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etis tetapi seringkali tidak dipatuhi oleh individu dalam organisasi tersebut	RS2	0.821	**0.737**
	Seminar dan pelatihan etis mengenai standar tuntutan organisasi, yang menjelaskan praktik yang tidak diperbolehkan sering dilaksanakan tetapi sulit diimplementasikan dalam organisasi	RS3	0.914	
	Ada indikasi tidak semua perilaku tidak etis dalam organisasi pemerintah diberi sanksi	RS4	0.896	
	Lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor tidak sampai ke masalah etis dalam organisasi terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran	RS5	0.797	
Capability/ Sikap Terhadap Perilaku *Fraud* (CS)	Individu yang memiliki *capability* (kemampuan) seringkali berasumsi bahwa *fraud* (kecurangan) yang diperbuatnya minim risiko	CS1	0.822	**0.754**
	Ada persepsi bahwa menyiasati perencanaan dan penganggaran adalah hal yang lumrah terjadi dalam organisasi	CS2	0.875	
	Perilaku menaikkan rincian belanja dari kebutuhan sebenarnya adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran	CS3	0.872	

	Sikap percaya diri dengan kemampuan dan posisi strategisnya dalam organisasi sering menjadi pembenaran, bahwa *fraud* (kecurangan) yang dilakukan tidak akan terdeteksi	CS4	0.902	
Capability/ Norma Subjektif (CN)	Ada persepsi bahwa *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat ditolerir dalam organisasi	CN1	0.846	
	Ada persepsi bahwa adalah hal yang wajar/biasa terjadi apabila ada pihak-pihak tertentu yang memberikan gratifikasi untuk memuluskan kepentingannya dalam proses anggaran	CN2	0.917	
	Sedikit melanggar aturan dan menyimpang dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat diterima	CN3	0.855	
	Ada indikasi pihak legislatif mengarahkan panitia anggaran memasukkan program yang tidak ada dalam perencanaan sebelumnya dan hal tersebut sepengetahuan/seijin atasan	CN4	0.862	
	Ada persepsi bahwa untuk memuluskan suatu tujuan untuk kepentingan pribadi maupun organisasi diperlukan pengorbanan finansial terlebih dahulu	CN5	0.853	
Capability/ Kontrol Perilaku (CK)	Karena perilaku ingin menguasai, orang-orang tertentu yang memiliki *capability* (kemampuan) berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran	CK1	0.900	**0.759**
	Ada indikasi orang orang yang memiliki *capability* (kemampuan) dalam organisasi, cenderung berusaha mencapai tujuan dengan cara cara tertentu walaupun hal tersebut tidak dibenarkan	CK2	0.898	
	Kesempatan berada dalam posisi strategis dalam organisasi dipergunakan oleh individu dengan *capability* (kemampuan) untuk melakukan *fraud* (kecurangan) pada proses perencanaan dan penganggaran	CK3	0.910	
	Transparansi dokumen perencanaan seringkali dipergunakan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan *fraud* (kecurangan) dalam proses tersebut	CK4	0.812	
	Ada indikasi terjadi kerja sama antara badan anggaran legislatif dengan panitia anggaran di pihak eksekutif dalam memasukkan program program tertentu yang tidak direncanakan sebelumnya dan hal ini merupakan hal yang biasa terjadi	CK5	0.831	
Niat Berbuat *Fraud* (NF)	Ada indikasi bahwa perilaku *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan niat untuk memuluskan kepentingan diri sendiri atau orang lain	NF1	0.901	**0.879**
	Untuk melakukan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran pelaku sudah merencanakannya dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses ini	NF2	0.938	
	Ada indikasi bahwa para pelaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran melaksanakan niatnya dengan menutupi kecurangan secara formal sesuai peraturan yang kadang substansinya berbeda	NF3	0.956	
	Pelaku benar benar memahami celah dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga untuk merealisasikan niatnya, pelaku dapat dengan mudah menjalankan aksinya.	NF4	0.946	

Fraud/ Kecurangan (FR)	Tindakan kecurangan yang Bapak/Ibu ketahui dilakukan oleh orang dalam organisasi dengan sengaja untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain	FR1	0.878	**0.758**
	Bapak/Ibu mengetahui *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran juga dilakukan oleh pihak legislatif atau pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain	FR2	0.897	
	Ada pihak-pihak tertentu memberikan gratifikasi kepada panitia atau badan anggaran untuk meloloskan kepentingannya	FR3	0.913	
	Beberapa program/kegiatan yang dianggarkan tidak melalui mekanisme perencanaan	FR4	0.896	
	Anggaran selalu didesain defisit dan penerimaan dihitung rendah sehingga berpotensi inefisiensi dan korupsi	FR5	0.813	
	Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD tidak dijadikan acuan dalam menyusun RKPD/Renja SKPD dan hal ini dilakukan untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu	FR6	0.821	

Sumber: Data diolah

Tabel 4.9
Perbandingan Nilai *Item Loading* dan Nilai AVE Awal dan Akhir

Variabel	**Kode**	**Nilai Awal (39-Item)**		**Nilai Akhir (34-Item)**	
		Loading	*AVE*	*Loading*	*AVE*
Tekanan (T)	T1	0.584	**0.573**	-	**0.661**
	T2	0.787		0.790	
	T3	0.854		0.855	
	T4	0.777		0.793	
Kesempatan/ Kelemahan Sistem Informasi (KS)	K1	0.716	**0.708**	-	**0.800**
	K2	0.880		0.896	
	K3	0.909		0.906	
	K4	0.849		0.881	
Rasionalisasi/ Budaya Etis Organisasi (RS)	RS1	0.474	**0.628**	-	**0.737**
	RS2	0.829		0.821	
	RS3	0.895		0.914	
	RS4	0.885		0.896	
	RS5	0.802		0.797	
Capability/Sikap Terhadap Perilaku *Fraud* (CS)	CS1	0.822	**0.754**	0.822	**0.754**
	CS2	0.875		0.875	
	CS3	0.872		0.872	
	CS4	0.902		0.902	
Capability/Norma Subjektif (CN)	CN1	0.846	**0.751**	0.846	**0.751**
	CN2	0.917		0.917	
	CN3	0.855		0.855	
	CN4	0.862		0.862	
	CN5	0.853		0.853	
Capability/ Kontrol Perilaku (CK)	CK1	0.900	**0.759**	0.900	**0.759**
	CK2	0.898		0.898	

	CK3	0.910		0.910	
	CK4	0.812		0.812	
	CK5	0.831		0.831	
Niat Berbuat *Fraud* (NF)	NF1	0.909	**0.879**	0.901	**0.879**
	NF2	0.939		0.938	
	NF3	0.956		0.956	
	NF4	0.947		0.946	
Fraud/ Kecurangan (FR)	FR1	0.861	**0.668**	0.878	**0.758**
	FR2	0.867		0.897	
	FR3	0.881		0.913	
	FR4	0.894		0.896	
	FR5	0.794		0.813	
	FR6	0.827		0.821	
	FR7	0.640		-	
	FR8	0.743		-	

Sumber: Data diolah

Untuk uji validitas konvergen Fornell dan Larcker (1981) merekomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 0.5 yang berarti bahwa 50% atau lebih varian dari indikator dapat dijelaskan. Pada saat pengolahan data di awal terdapat nilai loading dibawah 0.5 yaitu item pertanyaan (RS1) dengan nilai loading 0,474. Setelah item pertanyaan tersebut dikeluarkan semua nilai *loading* dan AVE telah memenuhi syarat tetapi setelah dilakukan pengujian validitas *discriminant* dengan melihat *cross loading correlation* terdapat nilai item pertanyaan dari variabel lain yang lebih besar dari nilai pertanyaan varibel itu sendiri sehingga dilakukan pengolahan kembali dengan mengeluarkan 4 item pertanyaan yakni TE1,KS1, FR7 dan FR8 sehingga seluruh variabel cenderung stabil dan memenuhi syarat nilai *loading*, AVE dan *cross loading correlation*.

2. Uji Validitas *Discriminant*

Uji validitas *discriminant* ini lebih menekankan kepada konstruk yang berbeda seharusnya tidak saling berkorelasi. Cara yang sering digunakan untuk menguji validitas *discriminant* adalah dengan melihat nilai *cross loading*

correlation untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0.50 dan Membandingkan nilai setiap *Fornell-Larker Criterion* konstruk. Tabel 4.10 berikut menyajikan nilai *cross loading* item masing-masing variabel

Tabel 4.10
Nilai *Cross Loading*

	TE	KS	RS	CS	CN	CK	NF	FR
TE2	0.790	0.226	0.328	0.328	0.332	0.359	0.232	0.279
TE3	0.855	0.345	0.273	0.400	0.420	0.421	0.305	0.355
TE4	0.793	0.196	0.194	0.417	0.471	0.357	0.244	0.281
KS2	0.294	0.896	0.718	0.541	0.404	0.533	0.425	0.455
KS3	0.333	0.906	0.677	0.551	0.391	0.430	0.342	0.422
KS4	0.240	0.881	0.688	0.603	0.344	0.473	0.410	0.459
RS2	0.194	0.612	0.821	0.521	0.400	0.462	0.381	0.376
RS3	0.337	0.729	0.914	0.592	0.440	0.554	0.460	0.504
RS4	0.323	0.706	0.896	0.631	0.434	0.558	0.424	0.468
RS5	0.248	0.609	0.797	0.551	0.424	0.480	0.359	0.394
CS1	0.343	0.585	0.635	0.822	0.552	0.632	0.520	0.556
CS2	0.476	0.580	0.612	0.875	0.654	0.684	0.567	0.554
CS3	0.415	0.532	0.550	0.872	0.690	0.657	0.563	0.552
CS4	0.397	0.517	0.550	0.902	0.691	0.765	0.719	0.640
CN1	0.424	0.322	0.432	0.698	0.846	0.665	0.525	0.468
CN2	0.423	0.367	0.408	0.672	0.917	0.736	0.609	0.584
CN3	0.371	0.262	0.349	0.552	0.855	0.621	0.502	0.463
CN4	0.476	0.410	0.466	0.678	0.862	0.711	0.579	0.563
CN5	0.465	0.461	0.479	0.636	0.853	0.721	0.583	0.648
CK1	0.357	0.442	0.485	0.719	0.710	0.900	0.689	0.633
CK2	0.374	0.465	0.529	0.649	0.658	0.898	0.695	621
CK3	0.423	0.469	0.509	0.748	0.745	0.910	0.724	0.748
CK4	0.454	0.478	0.541	0.631	0.616	0.812	0.547	0.569
CK5	0.449	0.491	0.567	0.702	0.747	0.831	0.656	0.678
NF1	0.360	0.382	0.435	0.679	0.674	0.772	0.910	0.770
NF2	0.288	0.429	0.411	0.620	0.600	0.701	0.938	0.782
NF3	0.289	0.392	0.458	0.669	0.570	0.670	0.956	0.751
NF4	0.272	0.447	0.480	0.621	0.583	0.720	0.946	0.770
FR1	0.305	0.411	0.478	0.611	0.535	0.675	0.818	0.878
FR2	0.350	0.465	0.534	0.663	0.545	0.666	0.799	0.897
FR3	0.288	0.397	0.380	0.556	0.544	0.650	0.755	0.913
FR4	0.411	0.493	0.452	0.590	0.619	0.701	0.695	0.896
FR5	0.262	0.392	0.393	0.444	0.530	0.609	0.589	0.813
FR6	0.403	0.453	0.421	0.593	0.543	0.607	0.578	0.821

Sumber : Data diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai dari *cross loading correlation* dimana sebelumnya terdapat nilai-nilai pertanyaan dan variabel lain yang lebih besar dari variabel itu sendiri sehingga dilakukan pengolahan data kembali dengan mengeluarkan item-item pertanyaan TE1, KS1, FR7 dan FR8 sehingga menghasilkan nilai yang telah memenuhi syarat validitas *discriminant* seperti pada tabel di atas.

Tabel 4.11
Nilai korelasi antar variabel

Variabel	TE	KS	RS	CS	CN	CK	NF	FR
Tekanan (TE)	**0.813**	0	0	0	0	0	0	0
Kesempatan (KS)	0.322	**0.895**	0	0	0	0	0	0
Rasionalisasi (RS)	0.327	0.777	**0.858**	0	0	0	0	0
Capability (Sikap) (CS)	0.469	0.632	0.670	**0.868**	0	0	0	0
Capability (Norma Subjektif) CN)	0.500	0.424	0.494	0.748	**0.867**	0	0	0
Capability (Kontrol Perilaku) (CK)	0.469	0.537	0.601	0.793	0.800	**0.871**	0	0
Niat (NF)	0.323	0.440	0.476	0.691	0.648	0.765	**0.938**	0
Fraud (FR)	0.385	0.499	0.512	0.666	0.633	0.749	0.820	**0.871**

Sumber : Data diolah

Tabel 4.11 di atas menunjukkan rata-rata nilai konstruk setiap variabel dengan variabel itu sendiri lebih besar dari 0.70. Nilai korelasi untuk setiap variabel (angka yang dicetak tebal) dengan variabel itu sendiri memiliki nilai yang lebih besar apabila dibandingkan pada korelasi dengan variabel lainnya. Ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi pengujian validitas *discriminant*.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas menggunakan nilai pada *composite reliability.* Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* lebih dari 0.7 (Henseler

dkk., 2014). Dari hasil pengolahan data penelitian ini nilai *composite reliability* memiliki nilai diatas 0.7 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel yang digunakan reliabel.

Tabel 4.12
Nilai *Composite Reliability*

Variabel	*Composite Reliability*
Tekanan (TE)	0.854
Kesempatan (KS)	0.923
Rasionalisasi (RS)	0.918
Capability (Sikap terhadap pelaku *Fraud*) (CS)	0.924
Capability (Norma Subjektif) (CN)	0.938
Capability (Kontrol Perilaku) (CK)	0.940
Niat Berbuat *Fraud* (NF)	0.967
Fraud (FR)	0.949

Sumber : Data diolah

4.3 Hasil Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

4.3.1 Hasil Uji *Collinearity* (*Inner VIF Values*)

Jika telah dilakukan pengujian *outer model* dan semua variabel dikatakan telah memenuhi syarat maka selanjutnya adalah melakukan pengujian *inner model*. Pada tabel 4.14 akan disajikan tabel uji *collinearity (Inner VIF Values)*

Tabel 4.13
Hasil Uji *Collinearity (Inner VIF Values)*

	FR	TE	KS	RS	CS	CN	CK	NF
Fraud (FR)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekanan (TE)	1.177	-	-	-	-	-	-	-
Kesempatan (KS)	2.586	-	-	-	-	-	-	-
Rasionalisasi (RS)	2.691	-	-	-	-	-	-	-
Niat (NF)	1.363	-	-	-	-	-	-	-
Capability (Sikap) (CS)	-	-	-	-	-	-	-	2.984
Capability (Norma) CN)	-	-	-	-	-	-	-	3.070
Capability (Kontrol Perilaku) (CK)	-	-	-	-	-	-	-	3.648

Sumber : Data diolah

Collinearity adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan korelasi antara variabel laten dalam sebuah model. Kekuatan prediksinya tidak handal dan tidak stabil. Kolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan kesalahan terhadap penilaian signifikansi. *Collinearity* terjadi apabila VIF > 5. Jika hal tersebut ditemukan maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model pengukuran. Jika dihubungkan dengan tabel 4.13 di atas tidak terdapat variabel yang melebihi angka 5. *Range* nilai variabel berada pada posisi 1 sampai 3 sehingga dapat dikatakan semua variabel yang digunakan stabil.

4.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinan (*R-Square*)

Tabel 4.14
Hasil Uji *Coefficient Determinant (R-Square)*

Variabel	R Square
Fraud (FR)	0.706
Niat (NF)	0.604

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel *Fraud* (FR) memiliki nilai *R-Square* sebesar 0.706 yang berarti bahwa variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan niat mempengaruhi variabel *fraud* sebesar 70.6% sedangkan variabel Niat (NF) yang memiliki nilai *R-Square* 0.604 dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku sebesar 60.4%.

4.3.3 Hasil Uji Signifikansi (Uji-t)

Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *T- Statistic* dan nilai *P-Values* dengan memperhatikan *original sample* masing masing variabel. Seperti yang tampak pada tabel 4.15

Tabel 4.15
Hasil Uji Signifikansi

Hipotesis	Variabel	Original Sample	T-Statistic	P Values	Hasil
H1	TE → FR	0.102	2.044	0.041	Diterima
H2	KS → FR	0.111	1.579	0.115	Ditolak
H3	RS → FR	0.053	0.715	0.475	Ditolak
H4	CS → NF	0.218	2.474	0.014	Diterima
H5	CN→ NF	0.033	0.354	0.723	Ditolak
H6	CK → NF	0.565	6.028	0.000	Diterima
H7	NF → FR	0.713	13.953	0.000	Diterima

Suatu hipotesis dinyatakan dapat diterima jika nilai *T-Statistics* lebih besar dari nilai *T-Value* 1,96 (Alpha 5 %) dan untuk nilai *P-Values* < 0,05 dengan memperhatikan nilai *original sample*. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada beberapa hipotesis yang diterima atau terdukung oleh data yakni H1, H4, H6 dan H7 sementara ada 3 hipotesis yang ditolak yakni H2, H3 dan H5.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Tekanan (Tekanan eksternal) berpengaruh positif terhadap *Fraud* dalam perencanaan penganggaran

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah diperoleh di atas, diketahui bahwa pengaruh tekanan terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran memiliki nilai statistik sebesar 2.044 atau lebih besar dari 1.96 (alpha 5%) dengan P-Values sebesar 0,041 atau lebih kecil dari 0,05 dan original sample positif 0,102 . Dengan perolehan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran **diterima** atau terbukti didukung oleh data.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan beberapa penelitian yang menggunakan tekanan eksternal sebagai variabelnya (Martantya dan Daljono, 2013; Putra, 2016; Ardiyani dan Utaminingsih, 2015). Hasil-hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap *fraud* dalam laporan keuangan. Tekanan yang dimaksudkan dalam *fraud* laporan keuangan lebih menekankan kepada tekanan internal yang berasal dari diri sendiri yakni kebutuhan finansial, gaya hidup dan kebutuhan akan eksistensi diri.

Berbeda dengan hasil penelitian ini yang fokus kepada *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran dimana *fraud* ini lebih berasal dari tekanan eksternal di luar diri pelaku seperti dalam penelitian (Skousen, dkk., 2009; Schuchter dan Levi, 2015). Dalam proses perencanaan dan penganggaran pelaku melakukan *fraud* karena adanya unsur tekanan dari pimpinan, tekanan dari pihak legislatif pada saat pembahasan anggaran juga harapan dari organisasi itu sendiri untuk memasukkan kebutuhan organisasi yang tidak bisa dianggarkan secara formal dalam program kegiatan, untuk mempertahankan eksistensi dan jabatan dalam organisasi, pelaku tidak memiliki pilihan selain merealisasikan harapan dari pihak eksternal tersebut dan mengabaikan peraturan formal tentang mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri tahap ratifikasi anggaran merupakan tahapan yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan sulit Mardiasmo (2018) sehingga tekanan dari berbagai pihak sulit dihindari.

Implikasinya bagi SKPD yang telah menyiapkan SDM perencana melalui tahapan penjenjangan karir dan rangkaian diklat perencanaan, sulit

mengembangkan kemampuan diri dan kapasitasnya karena kinerja perencanaan APBD diarahkan langsung oleh atasan maupun pihak lain untuk kepentingannya masing masing. Program program prioritas yang sebenarnya harus dianggarkan pada tahun berjalan tidak dapat terlaksana. Instansi teknis terdesak melaksanakan program titipan dari pihak pihak tertentu dan mengesampingkan program yang sangat dibutuhkan oleh rakyat yang telah disuarakan dalam Musrenbang. Perlu kesiapan, dukungan dan komitmen dari semua pihak baik itu eksekutif maupun legislatif untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dengan berpegang pada rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Kepentingan rakyat haruslah menjadi prioritas. Jika tidak, akan muncul sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah karena adanya ketidakadilan dalam proses penganggaran.

4.4.2 Kesempatan (Kelemahan sistem informasi) berpengaruh positif terhadap *Fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

Dari pengujian hipotesis kedua (H2) yakni kesempatan yang diproksikan dengan kelemahan sistem informasi diperoleh data t-statistik sebesar 1,579 yang berarti lebih kecil dari 1.96 (Alpha 5 %) dengan original sample positif 0,111 Untuk P-values nilainya 0,115 yang berarti > 0.05. Dari data tersebut nilai t-statistik dan p-values tidak memenuhi syarat diterimanya hipotesis sehingga H2 **ditolak.**

Dari hasil angket yang diedarkan sebagian responden menjawab setuju bahwa kelemahan sistem informasi perencanaan dan penganggaran menjadi celah terjadinya *fraud*. Namun hal demikian tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* di perencanaan penganggaran. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan Cressy (1953) bahwa kesempatan menjadi salah satu elemen yang memotivasi individu untuk berbuat *fraud*. Kesempatan yang dimaksudkan oleh *Cressey* disini adalah

situasi yang memberikan peluang terjadinya *fraud* seperti sistem pengendalian dan prosedur yang lemah, SDM yang kurang kompeten dan kurangnya pengawasan. Beberapa penelitian konsisten dengan teori ini (Cohen dkk., 2010; Schuchter dan Levi, 2015; Akkeren dan Buckby, 2017).

Berbeda dengan hasil penelitian ini, dimana kelemahan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang digunakan sudah sangat baik sehingga sangat kecil celah untuk melakukan *fraud*. Saat ini pemerintah juga terus melakukan inovasi dan pembenahan terhadap sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Yang terbaru pemerintah meluncurkan aplikasi Krisna yakni sistem informasi perencanaan, penganggaran dan kinerja yang terintegrasi. Melibatkan banyak lembaga seperti Kementrian Dalam Negeri, Bapenas, Kementrian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penggunaan sistem informasi sangatlah tepat mengingat dalam proses perencanaan dan penganggaran melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda beda. Diperlukan sistem yang dapat mengakomodir kebutuhan dari masing masing *stockholder*.

Implikasinya penggunaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah dapat terus dimaksimalkan untuk mengakomodir semua kebutuhan perencanaan dan penganggaran mulai Bappeda yang memiliki tugas dan wewenang perencanaan pemerintah daerah, Semua SKPD yang di dalamnya melekat tugas perencanaan, bagian keuangan SKPD dan Dinas Keuangan yang memiliki tugas penganggaran. Semua instansi yang terlibat dalam proses ini dapat

memonitoring pelaksanaan perencanaan dan penganggaran APBD. Transparansi juga menjadi salah satu aspek penting dalam penggunaan sistem informasi ini. Semua pihak terutama masyarakat dapat mengontrol sejauh mana proses berjalan. Evaluasi juga sudah dapat dilakukan mulai dari tahap persiapan anggaran (preparation) sehingga *fraud* dapat diminimalisir.

4.4.3 Rasionalisasi (Budaya etis organisasi) berpengaruh positif terhadap *Fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

Dari hasil uji hipotesis variabel rasionalisasi dengan proksi budaya etis organisasi diperoleh t-statistik sebesar 0,715 yang berarti < 1,96 (Alpha 5 %) dengan original sampel 0,053 dan nilai p-values 0,475 yang berarti > 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) **ditolak** karena tidak didukung oleh data.

Berdasarkan jawaban persepsi dari responden banyak yang memberikan respon setuju bahwa terdapat kode etik dalam organisasi tetapi seringkali tidak dipatuhi oleh individu dalam organisasi. Namun dari jawaban tersebut tidak otomatis berpengaruh signifikan terhadap *fraud* dalam perencanaan penganggaran. Hasil ini kurang sesuai dengan teori *Cressy* (1953) yang menyebutkan bahwa rasionalisasi merupakan faktor yang mempengaruhi individu berbuat *fraud*. Bahkan Schuchter dan Levi (2015) dalam penelitiannya menyatakan rasionalisasi mengalahkan integritas individu sehingga ia berbuat *fraud*. Walaupun kurang sesuai dengan teori tetapi hasil ini konsisten dengan beberapa penelitian lain (Faisal, 2013 ; Najahningrum, 2013 ; Zulkarnain, 2013) yang menyatakan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Berdasarkan temuan tersebut, *fraud* di perencanaan dan penganggaran sangat berbeda dari *fraud* keuangan lainnya karena perilaku ini dipersepsikan oleh responden bukan dilakukan secara langsung dari diri sendiri atau karena pembenaran bahwa ini adalah sesuatu yang wajar terjadi (rasionasisasi) tetapi lebih erat kaitannya berasal dari luar diri pelaku dalam hal ini memenuhi harapan dari pihak lain seperti yang dibahas dalam hipotesis pertama. Berbeda dengan *fraud* keuangan lainnya yang dalam temuan penelitian sebelumnya berasal dari diri sendiri seperti tekanan finansial dan kelemahan dari sistem dan prosedur organisasi.

Implikasinya dari temuan ini adalah budaya etis organisasi yang telah dibangun untuk membentuk perilaku etis, tidak dapat mencegah individu untuk berbuat *fraud*. Budaya etis ini otomatis terkikis dengan adanya tekanan eksternal dari pihak pihak tertentu. Tuanakotta (2018) menyatakan korupsi bukan masalah budaya. Korupsi merupakan masalah yang berkenaan dengan sistem perekonomian dan kelembagaan. Selayaknya sistem kelembagaan yang dibangun dapat dikembalikan secara utuh berdasarkan partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan penyusunan anggaran dari proses awal. Eksekutif dan legislatif juga harus dapat menempatkan diri sesuai batasan tugas dan kewenangannya masing masing, mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan ego sektoral dan kepentingan masing masing pihak. Selain itu budaya etis yang dibangun dalam organisasi selayaknya terus dikembangkan dan dipertahankan. Pimpinan organisasi yang memegang kendali organisasi juga selayaknya menjadi panutan dalam bertindak dan berperilaku dalam organisasi, sehingga dengan

budaya etis yang terbangun dengan baik dapat menumbuhkan rasa malu berperilaku tidak etis sehingga budaya yang terbangun dapat meminimalisir *fraud*

4.4.4 *Capabillity* (Sikap) berpengaruh positif terhadap niat melakukan *Fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

Dari hasil pengujian variabel *capability* dengan proksi sikap diperoleh t-statistik sebesar 2.474 atau > 1.96 (Alpha 5%) dengan *original sample* positif 0,218 dan *p-values* sebesar 0.014 atau < 0.05 maka dapat dinyatakan hipotesis keempat (H4) *capabillity* (Sikap) berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran **diterima** atau terdukung oleh data.

Cohen, dkk., (2010) dalam penelitiannya mengembangkan tiga variabel untuk melihat perilaku individu berbuat *fraud* melalui *intention to engage fraud* dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991). Dalam penelitian ini variabel tersebut coba dikembangkan dengan variabel *capability* dalam teori *fraud diamond* Wolfe dan Hermanson (2004) untuk melihat bagaimana perilaku orang yang memiliki *capability* berbuat *fraud* melalui ketiga variabel tersebut. Dari hasil angket yang diedarkan kepada para perencana yang memiliki tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan di SKPD dan Auditor Inspektorat yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam proses ini menyatakan bahwa dalam temuan-temuan audit mereka, orang yang memiliki *capability* berpendapat bahwa menyiasati perencanaan dan penganggaran adalah lumrah terjadi. Selain itu menaikkan rincian belanja dari kebutuhan yang sebenarnya adalah sesuatu yang biasa dalam proses ini. Dalam artian semakin kurang baik sikap pelaku yang memiliki *capabillity* tersebut maka semakin besar pula potensi menimbulkan niat untuk berbuat *fraud*.

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki *cability* dalam proses ini sangat toleran terhadap *fraud*. Hal ini konsisten dengan penelitian Othman, dkk., (2015) yang menyatakan bahwa korupsi lebih disebabkan oleh perilaku individual dan faktor organisasi. Rabl (2011) Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) juga menyatakan sikap yang toleran terhadap *fraud* dapat mempengaruhi niat berbuat *fraud*.

Implikasinya, Cara pemimpin mengambil sikap akan mempengaruhi bagaimana bawahan bertindak dan perilaku. Korupsi politik dari para elit di tingkat atas akan mengakibatkan korupsi administrasi di tingkat bawah. Dalam proses perencanaan penganggaran hal ini sangat mempengaruhi kinerja organisasi, cara pimpinan menentukan sikap atas tekanan dari elit lainnya akan mempengaruhi bawahan. Untuk meminimalisir *fraud* para elit politik seharusnya dapat menentukan sikap yang lebih pro rakyat, eksekutif juga selayaknya dapat mempertahankan program program yang merupakan usulan dari bawah dan mengabaikan ego sektoral masing masing. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan sehingga ada partisipasi dan pelibatan publik yang dapat melakukan evaluasi terhadap rencana maupun penganggaran yang dilakukan.

4.4.5 *Capabillity* (Norma Subjektif) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Hasil uji hipotesis dari norma subjektif memiliki nilai t-statistik 0,354 atau < 1.96 (alpha 5%) dengan nilai original sample 0,033 dan nilai *p-values* 0.723 atau > 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis kelima (H5) pengaruh *capabillity* yang diproksikan dengan norma subjektif berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* **ditolak** atau tidak terdukung oleh data.

Norma subjektif disini merupakan proksi kedua yang dikembangkan dari capabillity dalam *fraud* diamond Wolfe dan Hermanson (2004) yang lebih menekankan kepada bagaimana individu mempersepsikan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang berada di lingkungannya. Berdasarkan jawaban-jawaban dari responden dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan organisasi saat ini sudah mengarah ke nilai-nilai positif sehingga hal ini mempengaruhi individu untuk menjauhi *fraud*. Hal ini kurang konsisten dengan penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) yang menyatakan dalam lingkungan organisasi pemerintah masih banyak nilai-nilai yang kurang positif yang berkembang terutama dalam proses pengadaan barang jasa sehingga dapat memicu terjadinya *fraud*.

Implikasi dari temuan tersebut, organisasi pemerintah hendaknya dapat lebih mempertahankan nilai-nilai positif dalam organisasi berupa membangun kultur organisasi yang lebih baik, membangun pemahaman mengenai tujuan organisasi bagi pimpinan maupun seluruh anggota organisasi agar seluruh elemen dapat mencintai *value* yang dituju secara bersama-sama sehingga dapat bekerja dengan saling mendukung secara moral layaknya berada di lingkungan keluarga. Pimpinan juga harus benar-benar memahami batas kewenangannya. Selayaknya organisasi harus punya nilai moral yang menjadi kunci keberhasilan seperti nilai-nilai transparansi dan integritas sehingga hal ini dapat meminimalisisr *fraud*.

4.4.6 Capabillity (kontrol perilaku) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan nilai t-statistik dari kontrol perilaku sebagai proksi dari *capabillity* terhadap niat berbuat *fraud* dalam

perencanaan dan penganggaran memiliki nilai t-statistik 6.028 atau > 1.96 (alpha 5%) dengan *original sample* 0, 565 dan nilai *p-values* 0,00. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis keenam (H6) **diterima** atau terdukung oleh data.

Kontrol perilaku yang dimaksudkan dalam proksi variabel ini adalah kurangnya kontrol perilaku yang mengakibatkan niat bagi individu untuk berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran terlebih jika hal tersebut didukung dengan kemampuan penguasaan organisasi dan posisi strategis yang dimilikinya. Hal ini makin mendukung niat pelaku untuk berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden ada indikasi bahwa pelaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam hal ini orang yang memiliki *capabillity* kurang dapat mengendalikan perilaku ingin menguasai karena kepentingan diri sendiri atau kelompoknya sehingga berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran diantaranya adalah kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam hal memasukkan anggaran yang tidak direncanakan sebelumnya atau bukan prioritas, memanfaatkan transparansi dokumen perencanaan untuk melakukan *fraud*, memanfaatkan jabatan untuk mengarahkan orang lain berbuat *fraud*, melakukan cara cara tertentu yang tidak dibenarkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Indikasi kurangnya pengendalian diri atau kontrol perilaku tersebut berpengaruh positif terhadap niat melakukan *fraud* dalam perencanaan penganggaran. Hal ini konsisten dengan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Ajzen (1991) dan hasil penelitian (Schuchter dan Levi, 2015 ; Othman dkk., 2015 ; Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016).

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah orang yang memiliki *capability* dan cenderung tidak memiliki kontrol perilaku yang baik dapat merusak tatanan organisasi. Lebih mudah melakukan *fraud*, mengabaikan budaya atau kultur organisasi yang telah dibangun dengan baik terutama bagi para bawahan. Sebagai aparatur pemerintah terutama ketika berada di level pimpinan hendaknya memiliki *self afficacy* dan *locus of control* yang baik. Bagaimana mereka dapat mengendalikan kehidupannya bukan hanya berorientasi kepada diri sendiri tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Bandura (1986) menyatakan Individu dengan tingkat *self afficacy* yang tinggi memiliki kecenderungan menunda kepuasan, berkomitmen tinggi, lebih rajin, lebih efektif dalam mencari solusi pemecahan masalah dan memiliki strategi penanggulangan masalah lebih baik.

4.4.7 Niat Berpengaruh Terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Menurut Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat memiliki pengaruh terhadap perilaku melalui tiga faktor yakni sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui t-statistik dari niat adalah 13.953 atau > 1.96 (alpha 5%) dengan *original sample* 0,713 dan *p-values* sebesar 0,00 atau < 0.05. Jadi dapat disimpulkan hipotesis ketujuh (H7) Niat berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan penganggaran **diterima** dan terdukung oleh data.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa niat berbuat *fraud* dipersepsikan oleh responden dengan niat pelaku berbuat *fraud* untuk kepentingan diri sendiri, orang

lain atau kepentingan golongan tertentu, kemudian merencanakan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses ini, melaksanakan niatnya dengan menutupi kecurangan secara formal. Untuk menjalankan niatnya pelaku benar-benar memahami seluk beluk serta celah dan kelemahan organisasi untuk menjalankan niatnya tersebut. Cohen dkk., (2010) juga menjelaskan bahwa niat berbuat *fraud* dari pelaku disertai dengan adanya peluang, persekongkolan, serakah dan kurangnya integritas.

Implikasi dari hasil ini adalah ketika individu sudah memiliki niat melakukan *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran maka kembali ke organisasi itu sendiri untuk memperbaiki sistem yang ada. Memperkokoh sistem pengawasan, mengembalikan partisipasi publik dalam perencanaan penganggaran, memaksimalkan sistem informasi yang digunakan, melibatkan auditor inspektorat maupun BPKP melakukan pendampingan terhadap proses ini. Karena salah satu aspek yang memotivasi *fraud* adalah tekanan eksternal diantaranya adalah tekanan dari pimpinan maka pimpinan organisasi juga selayaknya memiliki konsep moral Brown dkk., (2005) yakni *moral person* dan *moral manager*. Dimana *moral person* sendiri adalah bentuk integritas, keadilan dan kejujuran. Sedangkan *moral manajer* lebih kepada bentuk komunikasi, membangun standar etika dan perilaku etis. Dengan kedua konsep tersebut pemimpin akan lebih berperilaku etis dan kecenderungan tersebut akan di duplikasi oleh bawahannya. Jika ini dilakukan secara terus menerus maka ini akan membawa iklim yang baik dalam organisasi dan hal ini akan memaksa seluruh elemen organisasi untuk menjauhi *fraud* (Wicaksono dan Urumsah, 2017; Mayer dan Kuenzi, 2011)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teori *Fraud diamond* untuk melihat motivasi seseorang melakukan *fraud* yang dikombinasikan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk melihat sisi psikologis dari pelaku yang memiliki *capabillity*, yang melakukan *fraud* di mulai dari niat. Responden penelitian ini adalah bagian perencanaan SKPD yang memiliki tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan di SKPD dan bersentuhan langsung dengan seluruh rangkaian proses perencanaan dan penganggaran serta Auditor Inspektorat yang turut memberikan pendampingan dan pengawasan pada proses tersebut. Berdasarkan pengujian-pengujian yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Tekanan eksternal terbukti berpengaruh terhadap *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Berbeda dengan *fraud* keuangan lainnya *fraud* pada perencanaan dan penganggaran lebih berasal dari luar individu pelaku seperti perintah langsung dari atasan, tekanan dari unsur eksekutif dan tekanan dari organisasi itu sendiri untuk menganggarkan kegiatan yang mudah di pertanggungjawabkan.
2. Kelemahan sistem informasi terbukti tidak berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini karena sistem informasi perencanaan dan penganggaran pemerintah yang ada saat ini sudah terus dikembangkan sehingga dianggap dapat meminimalisir *fraud* dalam proses tersebut.

3. Budaya etis organisasi terbukti tidak berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran. Dalam hal ini budaya etis birokrasi yang semakin hari semakin membaik dianggap dapat meminimalisir *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. *Fraud* dalam proses ini dianggap bukan semata mata keinginan pribadi atau pembenaran bahwa apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang wajar terjadi seperti *fraud* keuangan lainnya tetapi lebih berasal dari tekanan eksternal di luar diri pelaku.
4. Sikap terbukti berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sikap dalam konteks ini merupakan proksi yang mewakili orang yang memiliki *capability* dalam proses tersebut. Semakin kurang baik sikap yang dimiliki oleh pelaku yang memiliki *capability* maka semakin besar potensi adanya niat berbuat *fraud*. Semakin toleran terhadap *fraud* maka hal ini dapat mempengaruhi niat berbuat *fraud*.
5. Norma subjektif terbukti tidak berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Norma subjektif merupakan proksi kedua mewakili *capabilit*y. Dalam penelitian ini norma-norma atau nilai yang berkembang di lingkungan pemerintah saat ini sudah semakin baik, maka hal ini dapat mencegah niat dari individu untuk berbuat *fraud* .
6. Kontrol perilaku terbukti berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Variabel ini merupakan proksi ketiga mewakili variabel *capability* dalam *fraud diamond*. Dapat dijelaskan bahwa orang yang memiliki *capability* dan kurang dapat mengendalikan perilaku ingin menguasai

karena kepentingan diri sendiri atau kelempoknya dapat berbuat *fraud* dalam proses ini. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya.

7. Niat berpengaruh terhadap perilaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sebagaimana *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa niat mempengaruhi perilaku seseorang maka dalam proses perencanaan dan penganggaran niat pelaku lebih didasarkan pada kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan kelompok tertentu kemudian merencanakan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses ini dan menutupi kecurangannya secara formal.

5.2 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, penelitian ini memberikan kontribusi :

1. Menambah literatur penelitian tentang *fraud* dalam perencanaan penganggaran, dapat menjadi sumber referensi riset baru bagi akademisi yang tertarik melakukan penelitian di bidang ini
2. Dalam penelitian ini penulis mengkombinasikan teori *fraud* diamond yang ke empat yakni capability dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk melihat lebih jauh sisi psikologis pelaku. Kombinasi variabel ini dapat menjadi sumbangan model penelitian selanjutnya mengingat referensi penelitian kuantitatif dalam topik ini masih sangat terbatas.

5.3 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada :

1. Lembaga yang memiliki kewenangan perencanaan dan penganggaran seperti Badan Perencanaan Pembangunan dan Badan Pengelola Keuangan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif benar-benar melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan kontrol pada proses tersebut sehingga pemanfaatan anggaran menjadi lebih tepat sasaran.
2. Lembaga-lembaga pengawasan seperti BPK, BPKP dan Inspektorat serta pemangku kebijakan di daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan strategi pencegahan *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran seperti *fraud reporting policy*, *fraud hotlines*, *whistleblowing policy dan ethics training* (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016)

5.4 Keterbatasan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal berupa kondisi responden, wilayah penyebaran kuisioner, teknik penyebaran kuisioner, dan faktor internal berupa kemampuan penulis. Secara umum, keterbatasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data penelitian ini menggunakan data internal dari hasil jawaban responden atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Karena sensitifitas pertanyaan yang diajukan maka ada indikasi bahwa responden tidak benar-benar

memberikan jawaban yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi sehingga mempengaruhi hasil penelitian.

2. Penggunaan Auditor Inspektorat sebagai bagian dari responden penelitian ini dianggap kurang dapat mempersepsikan mengapa pelaku berbuat *fraud* tetapi dalam penelitian ini penulis sudah memberikan justifikasi pemilihan responden tersebut. Kedepan untuk penelitian sejenis disarankan dapat menggunakan elemen yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran seperti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran, Pimpinan atau Wakil Pimpinan Daerah serta Pihak Legislatif.
3. Mengingat penelitian tentang *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran masih sangat terbatas maka topik ini perlu terus dikembangkan. Dalam hal variabel yang digunakan perlu diuji kembali variabel yang tidak berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran yakni kesempatan dan rasionalisasi serta norma subjektif yang merupakan proksi dari *capabillity*. Mengingat variabel ini kurang konsisten dengan penelitian tentang *fraud* sebelumnya.

5.5 Saran

1. Karena mekanisme perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang melibatkan banyak orang, proses ini tidak luput dari politik dan kepentingan. Diperlukan aparatur pemerintah yang berintegritas dan memiliki komitmen terhadap birokrasi yang bersih dan regulasi yang tegas. Selain itu pihak legislatif juga selayaknya harus benar benar memahami batas kewenangannya dalam proses penganggaran dan lebih menyadari bahwa keberadaannya mewakili

kepentingan rakyat bukan mewakili golongan tertentu. Sistem partisipatif murni melibatkan masyarakat juga harus dikembalikan pada porsi yang sebenarnya. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mencegah *fraud* dalam proses ini.

2. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang digunakan saat ini dianggap sudah baik tetapi diperlukan pengembangan sistem secara terus menerus sehingga semakin kecil celah terjadinya *fraud*. Yang tidak kalah penting adalah fungsi transparansi dalam sistem ini sehingga masyarakat dapat bebas mengakses dan melakukan pengawasan terhadap aspirasi yang telah disampaikan dalam proses awal perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Association of Certified *Fraud* Examiner ACFE. (2008). *Report To The Nation on Occupational Fraud and Abuse*. USA. 2008 Global *Fraud* Study.

Adelina, dan Nadia. (2018). Analisis *Fraud* Diamond Dalam Mendeteksi Potensi Financial Statement *Fraud* Pada Perusahaan LQ-45 Periode 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *Vol.7*(1), 446–460.

Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2), 179- 211.

Ajzen, I. (2005). *Attitudes Personality and Behaviour 2nd*. *ed-open-university-press, International Journal of Strategic Innovative Marketing*, *3*, 117.

Akkeren, J., dan Buckby, S. (2017). *Perceptions on the Causes of Individual and Fraudulent Co-offending: Views of Forensic Accountants*. *Journal of Business Ethics*, *146*(2), 383–404.

Albrecht, W. S, C. C Albrecht, C. O Albrecht dan M. Zimbelman. 2009. *Fraud Examination, third Edition, South Western, a part of Chengange Learning, USA.*

Amri, A.B., D. P. 2012. (2012). Pengusaha was-was garap proyek pemerintah. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read%0A/336748

Ardiyani, N. S. U. (2015). Analisis Determinan *Financial Statement* Melalui Pendekatan *Fraud Triangle*. *Accounting Analysis Journal*, *4*(1), 1–10.

Aristiowati, I. (2015). Evaluasi Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Aryaksa,T, A., dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* AAJ 3(4), 1-10

Avianto, H., Alim, M. N., dan Tarjo. (2018). *The Effect Of Monopoly Power And Integrity On The Tendency To Commit Fraud In E-Procurement. Asia Pacific Fraud Journal*, *4*(1). 1-10

Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. *American Psycologist.*

Chin, Wynne W., and P. R. N. (1999). *Structural Equation Modeling Analysis With Small Samples Using Partial Least Squares." Statistical Strategies For Small Sample*, *Statistical Strategies For Small Sample Research*, *1*(1), 307-341.

Cohen, J., Ding, Y., Lesage, C., dan Stolowy, H. (2010). *Corporate Fraud and Managers' Behavior: Evidence from the Press*. *Journal of Business Ethics*, *95*(SUPPL. 2), 271–315.

Cressy, D. (1953). *Other People's Money: The Social Psychology of Embezzlement*. New York, NY US." Free Press.

Daigle, R. J., Hayes, D. C., dan Morris, P. W. (2014). Dr. Phil and Montel help AIS students *"Get Real" with the fraud triangle*. *Journal of Accounting Education*, *32*(2), 146–159.

Davia, H. R. (2000). *Fraud 101 : Tekniques and Strategies For Detection*. John Wiley and Soons.

Dellaportas, S. (2013). *Conversations With Inmate Accountants : Motivation, Opportunity and The Fraud Triangle*. *Accounting Forum*, *37*(1), 29–39.

Didi, D., dan Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, *15*(1), 1-20.

Faisal, M. (2013). Analisis *Fraud* Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1).

Fornell, C., dan Larcker, D. F. (1981). *Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error*. *Journal of Marketing Research*. *18*(1), 39-50.

Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. BP Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2009). Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, L. (2015a). Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0. Untuk Penelitian Empiris Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, L. (2015b). Partial Least Squares Konsep, teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris (edisi 2). Undip.

Heriningsih, (2015) Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor, The 1st University Research Colloquium (URECOL) 2015

Henseler, J., Ringle, C. M., dan Sarstedt, M. (2014). *A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, *43*(1), 115-135

Heriawati, L. (2018). Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan BarangJasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab Pandeglang,Tesis, STIAMI

Indriani, N., Alim, M. N., dan Haryadi, B. (2019a). Potret *Fraud* pada Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, *22*(1), 115–122.

Indriani, N., Alim, M. N., dan Haryadi, B. (2019b). Potret *Fraud* Pada Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi Publik, *2*(1), 19–31.

Iskandar Dudi, dan Rina Bukit, I. Y. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Politik Penganggaran, Dengan Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating Terhadap Sinkronisasi Dokumen Apbd Dengan Dokumen KUA - PPAS Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. *Proceedings of AICS-Social Sciences 6*(1), 93–108.

Jumaidi, L. T. (2014). Perilaku Legislatif Dalam Praktik Penganggaran dengan Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.

Mahyarni. (2013). *Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior* (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). Jurnal El-Riyasah, *4*(1), 13–23.

Mardiasmo. (2018a). Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset, Yogyakarta.

Martantya, D. (2013). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keluangan Melalui Faktor Risiko, Tekanan dan Peluang (Studi Kasus pada Perusahaan yang Mendapat Sanksi dari Bapepam Periode 2002-2006). *Diponegoro journal of accounting* 2.2 (2013): 1-12.

Mayer, D. M, M. Kuenzi, and R. L. G. (2011). *Commit fraud with Theory of Planned Behavior as basis of research model. Journal of Business Ethics.*

Michael Höck and Christian M. Ringle. (2006). *Strategic Networks In The Software Industry : An Empirical Analysis Of The Value Continuum, In IFSAM VIIIth World Congress* (Vol. 28, p. 2010).

Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud*: Persepsi Pegawai. *Accounitng Analysis Journal*, *2*(3), 259–267.

Nay, O. (2011). *What Drives Reforms In International Organizations? External Pressure and Bureaucratic Entrepreneurs In The UN Response To AIDS*. *Governance*, *24*(4), 689–712.

Othman, R., Aris, N. A., Mardziyah, A., Zainan, N., dan Amin, N. M. (2015). *Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions. Procedia Economics and Finance*, *28*(April), 59–67.

Perdana, A. A., Hasan, A., dan M., R. (2018). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Persepsi Kontrol Perilaku dan Etika Terhadap Whistleblowing Intention dan Perilaku Whistleblowing (Studi Empiris di BPKP Perwakilan Riau dan Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, *11*(1), 89–98.

Permana, B. A., Perdana, H. D., dan Kurniasih, L. (2017). *Determinant of Fraud in Government Agency: Empirical Study At the Finance and Development Supervisory Agency (Bpkp) of Jakarta Representative Office*. *Asia Pacific Fraud Journal*, *2*(1), 93.

Pramudita, A. (2013). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan. (Persepsi Pegawai Pada Dinas Se-Kota Salatiga), Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang.

Puspasari, N., & Dewi, M. K. (2015). Pengaruh Penalaran Moral Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Tekanan Situasional terhadap Kecenderungan Melakukan *Fraud* saat Mengaudit: Sebuah Studi Eksperimen. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*

Putra, B. M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuanagan. Studi Empiris pada Satuam Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, 1–28. Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rabl, T. (2011). *The Impact of Situational Influences on Corruption in Organizations. Journal of Business Ethics*, *100*(1), 85-101

Ramdhani, N. (2016). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis *Theory of Planned Behavior*. Buletin Psikologi, *19*(2), 55–69.

Rae and Subramaniam.2008. *Quality Of Internal Control Procedures Antecedents And Moderating Effect On Organisational Justice And Employee Fraud. Managerial Auditing Journal* Vol. 23 No. 2.

Razak, A., Ludigdo, U., Sukoharsono, E. G., dan Thoyib, A. (2011). Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik. *Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya.

Ridha, M. A. dan Basuki, H. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, *3*(2), 87-100.

Schuchter, A., dan Levi, M. (2015). *Beyond The Fraud Triangle: Swiss and Austrian Elite fraudsters*. *Accounting Forum*, *39*(3), 176–187.

Setiawan, A. R., Irianto, G., Achsin, M., Madura, U. T., dan Brawijaya, U. (2013). *System-Driven (un) Fraud, Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *4*(1), 85-100.

Sholihah, S., Alim, M. N., dan Musyarofah, S. (2016). Memotret Pola *Fraud* Pada Rincian Objek Belanja yang Menjadi Temuan BPK. *JAFFA*, *53*(9), 1689–1699.

Singleton, dan Aaron. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Wiley & Sons.

Skousen, C. J., Smith, K. R., dan Wright, C. J. (2009). *Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99 in Corporate Governance and Firm Performance. In International Journal of Quality and Reliability Management* (Vol. 32, Issue 3).

Suryono, E., dan Chariri, A. (2016). Sikap, Norma Subjektif, dan Intensi Pegawai Negeri Sipil Untuk Mengadukan Pelanggaran (Whistle-Blowing). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *13*(1), 102–116.

Syahria Rizqa, F. K. dan A. D. E. (2019). *Detecting Financial Statement Fraud Using Fraud Diamond (A Study on Banking Companies Listed On the Indonesia Stock Exchange Period 2012-2016). Asia Pacific Fraud Journal*, *4*(2).

Tehupuring, R. (2018). *Unqualified Opinion and Level of Corruption: the Triangulation Approach*. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, *4*(2), 187.

Tehupuring, R., dan Lingga, R. A. (2017). *System As Predictor in Local Government . Mitigate It ? Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. *3*(2), 113-129

Tuanakotta, T. M. (2018). *akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba empat.

Wasana, S. (2018). Analisisi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, *1*(2), 70-81.

Wicaksono, A. P., dan Urumsah, D. (2017). Factors Influencing Employees To Commit *Fraud* in Workplace Empirical Study in Indonesian Hospitals. *Asia Pacific Fraud Journal*, *1*(1), 1-18

Wolfe, dan Hermanson. (2004). *The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. CPA Journal.*

Wulandari Susi, Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., C. (2014). Determinan Terjadinya *Fraud* di Instansi Pemerintah (Persepsi Pada Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi NTB). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2016, 1–32.

Yesiariani, M., dan Rahayu, I. (2017). Deteksi Financial Statement *Fraud*, Pengujian Dengan *Fraud* Diamond. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 21(1).

Yuhertiana, I., Pranoto, S., dan Priono, H. (2015). Perilaku Disfungsional Pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, *19*(1), 25–38.

Zimbelman, Mark, dkk. 2014. “Akuntansi Forensik”. Jakarta: Salemba Empat

Zulaikha, Z., dan Hadiprajitno, P. T. B. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement *Fraud*: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, *13*(2), 194–220.

Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, *2*(2).

https://www.kompasiana.com/muhammad76514/5cf182a618ffee0e85635d78/permasalahan-anggaran?page=all diakses 11/2/2020

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747 diakses 26/2/2020

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190207072914-12-367023/jejak-suap bupati-kotim-yang-rugikan-negara-rp58-triliun, diakses 24/11/2019

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/06/12475621/zumi-zola-divonis-6-tahun-penjara?page=all diakses 24/11/2019

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747 diakses 28/11/2019

http://seknasfitra.org/korupsi-sudah-terjadi-sejak-perencanaan-anggaran diakses 27/1/20

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191030144124-20-444141/soal-aibon-dan-pulpen-anggaran-atk-direvisi-jadi-rp22-miliar diakses 7/1/20

http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/content/Publikasi/Manual%20Approval%20KRISNA.pdf diakses 27/1/20

https://menpan.go.id/site/berita-terkini/aplikasi-krisna-perkuat-akuntabilitas-perencanaan-kinerja-pemerintah diakses 27/1/20

L A M P I R A N

Lampiran 1 : Kuisioner Penelitian

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bapak/Ibu yang saya hormati

Perkenalkan saya Indrawati Usuli, Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Program Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Forensik di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian tentang ***Fraud*** **(Kecurangan) dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran.** Untuk kepentingan penelitian ini, saya sangat menghargai dan berterima kasih, jika Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap dan memberikan jawaban yang paling mencerminkan kondisi sebenarnya yang dialami Bapak/ibu. Kuesioner ini tanpa identitas, semua pernyataan yang diberikan hanya akan digunakan untuk penelitian akademik dan aksesnya terbatas hanya bagi peneliti.

Kuisioner ini ditujukan untuk Bapak/Ibu yang saat ini bertugas atau pernah menempati posisi sebagai:

1. Bagian perencanaan di Prov/Kab/Kota
2. Auditor Internal (Inspektorat) Prov/Kab/Kota

Berikut link kuisioner online.

https://forms.gle/uAhnvRMh2zfg1zMA7

Atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di:

WA: 085237043496, Email: indrawatiusuli@gmail.com

KUESIONER

Petunjuk Pengisian Kuesioner

BAGIAN A.

Pada bagian A, mohon Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan berikut dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia (□).

Jenis kelamin	: □ Laki-laki	□ Perempuan
Umur	: □ < 20 tahun	□ 41 – 50 tahun
	□ 21 – 30 tahun	□ 51 – 60 tahun
	□ 31 – 40 tahun	
Pendidikan	: □ D3 □ S1	□ S2 □ S3
Posisi pada bagian	: □ Perencanaan	□ Audit Internal
	□ Pem. Propinsi	□ Pem. Kabupaten
	□ Pem. Kota	
Wilayah	: □ Jawa	□ Sumatra
	□ Kalimantan	□ Sulawesi
	□ Ternate	
	□ Nusa Tenggara	□ Lainnya

BAGIAN B.

Pernyataan berikut merupakan gambaran persepsi Bapak/Ibu sebagai perencana dan atau auditor internal terhadap perencanaan dan penganggaran. Mohon dijawab dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia (□) sesuai dengan angka yang Bapak/Ibu pilih. Angka tersebut menunjukkan seberapa jauh Bapak/Ibu setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan.

1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Agak Tidak Setuju
4 = Agak Setuju
5 = Setuju
6 = Sangat Setuju

Menurut Bapak/Ibu, seberapa jauh Bapak/Ibu **setuju bahwa pernyataan-pernyataan berikut merupakan penyebab terjadinya *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran !**

1	2	3	4	5	6
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Agak Setuju	Setuju	Sangat Setuju

PERNYATAAN	**JAWABAN**					
TEKANAN/ *PRESURE EKSTERNAL*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Menurut Bapak/Ibu adanya pembatasan jumlah anggaran untuk masing-masing organisasi membuat organisasi tidak konsisten dengan perencanaan yang sudah dibuat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Ada kecenderungan pimpinan memberikan arahan untuk menganggarkan kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Ada kecenderungan pihak legislatif meminta badan anggaran pemerintah daerah untuk memasukkan atau menghilangkan anggaran tertentu yang tidak ada perencanaannya	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Adanya kebutuhan organisasi yang tidak bisa dianggarkan menyebabkan organisasi menyiasati dengan memasukkan kebutuhan tersebut kedalam anggaran lain dengan jumlah yang lebih besar	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PERNYATAAN	**JAWABAN**					
KESEMPATAN / KELEMAHAN SISTEM INFORMASI	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Sistem informasi yang digunakan masih terbatas untuk satu mekanisme saja yakni sistem informasi perencanaan di bagian perencanaan dan sistem informasi penganggaran di bagian keuangan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Berbagai kendala teknis menyebabkan belum sinkronnya perencanaan dan penganggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Terbatasnya akses ke masing-masing sistem informasi menyebabkan evaluasi hasil perencanaan ke penganggaran sulit dilakukan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Tidak sinkronnya sistem perencanaan dan penganggaran menjadi celah terjadinya *fraud* (kecurangan)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PERNYATAAN	JAWABAN					
RASIONALISASI/BUDAYA ETIS ORGANISASI	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Arahan pimpinan dalam organisasi menjadi acuan dalam melaksanakan aktifitas organisasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Dalam organisasi terdapat kode etik yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etis tetapi seringkali tidak dipatuhi oleh individu dalam organisasi tersebut	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Seminar dan pelatihan etis mengenai standar tuntutan organisasi, yang menjelaskan praktik yang tidak diperbolehkan sering dilaksanakan tetapi hal ini sulit diimplementasikan dalam organisasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Ada indikasi tidak semua perilaku tidak etis dalam organisasi pemerintah diberi sanksi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor tidak sampai ke masalah etis dalam organisasi terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PERNYATAAN	JAWABAN					
CAPABILITY* /SIKAP TERHADAP PERILAKU *FRAUD	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Individu yang memiliki *capability* (kemampuan) seringkali berasumsi bahwa *fraud* (kecurangan) yang diperbuatnya minim risiko	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Ada persepsi bahwa menyiasati perencanaan dan penganggaran adalah hal yang lumrah terjadi dalam organisasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Perilaku menaikkan rincian belanja dari kebutuhan sebenarnya adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Sikap percaya diri dengan kemampuan dan posisi strategisnya dalam organisasi sering menjadi pembenaran, bahwa *fraud* (kecurangan) yang dilakukan tidak akan terdeteksi	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PERNYATAAN	JAWABAN					
***CAPABILITY* / NORMA SUBJEKTIF**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Ada persepsi bahwa fraud (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat ditolerir dalam organisasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Ada persepsi bahwa adalah hal yang wajar/biasa terjadi apabila ada pihak-pihak tertentu yang memberikan gratifikasi untuk memuluskan kepentingannya dalam proses anggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Sedikit melanggar aturan dan menyimpang dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat diterima	☐	☐	☐	☐	☐	☐

4. Ada indikasi pihak legislatif mengarahkan panitia anggaran memasukkan program yang tidak ada dalam perencanaan sebelumnya dan hal tersebut sepengetahuan/seijin atasan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Ada persepsi bahwa untuk memuluskan suatu tujuan untuk kepentingan pribadi maupun organisasi diperlukan pengorbanan finansial terlebih dahulu	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PERNYATAAN	**JAWABAN**					
***CAPABILITY* / KONTROL PERILAKU**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Karena perilaku ingin menguasai, orang-orang tertentu yang memiliki *capability* (kemampuan) berbuat *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Ada indikasi orang orang yang memiliki *capability* (kemampuan) dalam organisasi, cenderung berusaha mencapai tujuan dengan cara cara tertentu walaupun hal tersebut tidak dibenarkan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Kesempatan berada dalam posisi strategis dalam organisasi dipergunakan oleh individu dengan *capability* (kemampuan) untuk melakukan *fraud* (kecurangan) pada proses perencanaan dan penganggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Transparansi dokumen perencanaan seringkali dipergunakan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan *fraud* (kecurangan) dalam proses tersebut	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Ada indikasi terjadi kerja sama antara badan anggaran legislatif dengan panitia anggaran di pihak eksekutif dalam memasukkan program program tertentu yang tidak direncanakan sebelumnya dan hal ini merupakan hal yang biasa terjadi	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PERNYATAAN	**JAWABAN**					
NIAT BERBUAT *FRAUD*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Ada indikasi bahwa perilaku *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan niat untuk memuluskan kepentingan diri sendiri atau orang lain	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Untuk melakukan fraud dalam perencanaan dan penganggaran pelaku sudah merencanakannya dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses ini	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Ada indikasi bahwa para pelaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran melaksanakan niatnya dengan menutupi	☐	☐	☐	☐	☐	☐

kecurangan secara formal sesuai peraturan yang kadang substansinya berbeda						
4. Pelaku benar benar memahami celah dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga untuk merealisasikan niatnya, pelaku dapat dengan mudah menjalankan aksinya.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PERNYATAAN	**JAWABAN**					
***FRAUD*/KECURANGAN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Tindakan kecurangan yang Bapak/Ibu ketahui dilakukan oleh orang dalam organisasi dengan sengaja untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Bapak/Ibu mengetahui *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran juga dilakukan oleh pihak legislatif atau pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Ada pihak-pihak tertentu memberikan gratifikasi kepada panitia atau badan anggaran untuk meloloskan kepentingannya	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Beberapa program/kegiatan yang dianggarkan tidak melalui mekanisme perencanaan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Anggaran selalu didesain defisit dan penerimaan dihitung rendah sehingga berpotensi inefisiensi dan korupsi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD tidak dijadikan acuan dalam menyusun RKPD/Renja SKPD dan hal ini dilakukan untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. Tidak adanya transparansi dalam penyusunan anggaran menyebabkan sulitnya melakukan kontrol terhadap anggaran berdasarkan perencanaan yang ada	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. Tahap penganggaran merupakan tahapan yang paling rawan terjadi *fraud* (kecurangan). Dalam tahapan ini muncul orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindakan untuk memuluskan kepentingannya.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Lampiran 2 : Tabulasi Data

TE 2	TE 3	TE 4	KS 6	KS 7	KS 8	RS 10	RS 11	RS 12	RS 13	CS 14	CS 15	CS 16	CS 17	C N 18	C N 19	C N 20	C N 21	C N 22	C K 23	C K 24	C K 25	C K 26	C K 27	NF 28	NF 29	NF 30	NF 31	FR 32	FR 33	FR 34	FR 35	FR 36	FR 37
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	6	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	6	5	6	4	5	5	5	4	5	5	5	6	5	5	5	6	5	6	5	5	5	6
5	5	5	4	2	6	3	6	6	5	5	6	4	3	1	1	2	1	3	5	5	3	5	3	4	3	4	4	4	5	2	3	1	1
5	6	6	6	6	6	1	6	5	6	6	5	6	5	3	3	1	6	6	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	6
5	5	5	6	4	6	6	6	6	6	6	3	3	6	1	6	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	6	5	5	2	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
2	2	2	2	2	5	5	5	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	4	2	3	3	3
4	4	5	3	4	5	4	4	3	4	4	5	6	5	4	4	2	3	3	3	3	4	2	3	4	3	4	4	5	5	3	3	4	4
5	5	2	5	5	3	3	4	4	5	4	5	4	2	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2
1	1	1	2	1	6	6	2	6	6	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	2	2	5	2	2	5	5	5	5	2	2	5	2	5	2	2	2	2	5	5	2	5	5	5	2	2	2	5	2	2	2	5	2
4	4	4	6	4	6	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	5	5	4
1	5	2	5	5	5	4	4	5	2	5	5	2	2	1	1	1	1	1	2	2	3	5	5	2	2	1	1	5	5	2	2	2	2
3	3	2	5	4	6	3	3	4	4	4	2	4	5	5	4	4	3	4	5	4	4	4	2	4	4	4	4	2	2	2	2	3	3
1	1	1	5	2	4	4	4	2	5	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2	2	1	5	2	6	4	5	4	5	6	2	5	5	1	1	1	2	1	4	4	4	3	3	6	5	5	5	5	5	5	5	5	4
2	1	2	5	5	5	4	4	2	5	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	2	1	1	2	2	2	2	5	5
5	5	3	5	5	6	4	6	5	6	5	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1	1	2	3
1	2	3	4	4	5	5	5	5	6	5	5	5	5	4	5	5	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	3	3	1	2	2	1
4	5	4	6	6	5	4	4	4	6	3	4	5	3	4	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	4	4
4	5	5	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2	3

4	2	1	5	1	2	5	4	4	3	4	1	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3
6	6	5	5	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	1	1	1	1	1	2	2	1	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	4	4	5	5	5	4	5	3	4	3	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
1	2	4	3	2	4	4	2	4	2	4	3	4	4	3	3	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3	3	2	5	6	6	5	6	6	6	6	2	6	6	2	1	1	1	3	1	1	6	2	1	1	6	6	4	6	6	5	6	3	6
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	1	2	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3
3	4	6	1	6	6	6	6	6	1	6	6	6	6	6	1	1	6	1	1	1	1	1	6	6	1	6	1	1	6	1	1	1	5
4	4	3	5	6	6	1	6	6	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
2	4	2	5	5	6	6	5	6	4	5	6	4	5	2	1	1	2	3	6	5	3	5	2	5	4	5	5	5	5	6	2	2	2
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	2	5	5	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	2
1	5	1	6	6	6	5	5	5	3	5	1	1	1	1	1	2	1	5	1	1	1	5	4	5	6	5	6	6	6	6	5	5	5
3	5	3	4	3	6	5	4	6	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3
4	3	1	2	2	2	2	2	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
3	5	4	6	6	6	5	6	5	4	5	5	5	5	4	6	5	5	5	3	3	4	5	4	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5
4	5	4	3	2	4	4	3	4	4	4	5	3	6	4	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	3	5	6	6	5	5	2	2	5
5	2	3	4	6	5	2	6	6	5	3	5	5	4	5	5	1	3	1	4	4	4	5	5	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
1	2	1	5	5	6	5	5	6	5	5	3	2	5	2	1	1	2	1	5	5	5	5	2	2	2	2	5	2	2	1	1	1	1
4	5	4	3	2	4	4	3	4	4	4	5	3	6	4	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	3	5	6	6	5	5	2	2	5
3	6	2	5	3	5	2	5	4	4	2	2	2	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	4	2
2	6	3	5	4	5	4	4	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
5	6	6	6	6	6	5	6	5	5	3	4	6	5	2	4	4	6	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5
3	4	3	5	6	6	5	5	5	6	5	6	4	5	2	3	1	2	3	6	5	5	2	2	5	4	4	4	5	6	4	4	3	3
3	4	3	5	5	5	4	4	4	6	5	5	5	3	2	2	2	6	5	4	4	4	2	4	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5
3	5	3	5	5	6	6	5	4	5	3	5	4	4	4	5	4	6	5	4	3	4	4	5	5	4	3	4	4	5	5	6	5	5

6	4	3	6	6	6	4	5	6	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	4	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	3	3	6	4	3	4	5	4	5	3	4	5	3	2	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	2	2	2	3	2
2	5	2	6	5	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	2	2	6	5	2	4	3	4	6	2	2	2	2	3	3	2	2	1	2
4	3	3	6	4	3	4	5	4	5	3	4	5	3	2	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	2	2	2	3	2
2	5	2	6	5	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	2	2	6	5	2	4	3	4	6	2	2	2	2	3	3	2	2	1	2
5	5	5	5	2	5	2	5	5	2	5	2	2	2	2	2	2	5	2	2	5	2	5	2	5	2	2	2	5	5	2	2	2	2
4	3	6	5	4	2	2	2	4	4	3	4	1	1	2	1	2	1	1	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	1	3	4	4
2	2	3	2	4	4	5	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2
3	3	4	4	3	5	4	3	3	2	5	5	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	2
6	5	4	5	5	6	5	5	5	5	3	5	4	6	2	2	1	2	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5
5	5	1	6	6	6	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	4	5	5	4	5	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	6	3	4	3	3	3	1	2	2	2	3	4	3	3	3	3
3	4	4	6	6	6	4	5	5	6	5	6	4	5	5	6	6	5	5	5	5	4	3	6	6	6	6	6	6	6	5	4	5	5
5	5	4	5	5	6	5	6	5	5	5	4	4	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	1	3	2	3
5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	2	2	5	3	5
3	6	6	6	6	6	6	6	5	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	4	2	2
5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	3	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	3	3
2	2	3	2	4	4	5	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	
3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2
6	4	4	4	3	3	3	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4
2	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5
2	2	2	6	5	6	4	3	4	2	1	4	2	5	1	1	1	2	1	4	4	3	2	2	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	4	6	6	6	5	6	5	6	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4
6	6	1	5	5	5	2	2	2	5	2	1	4	4	1	2	1	1	2	1	2	1	6	1	2	2	2	4	4	2	2	2	1	4

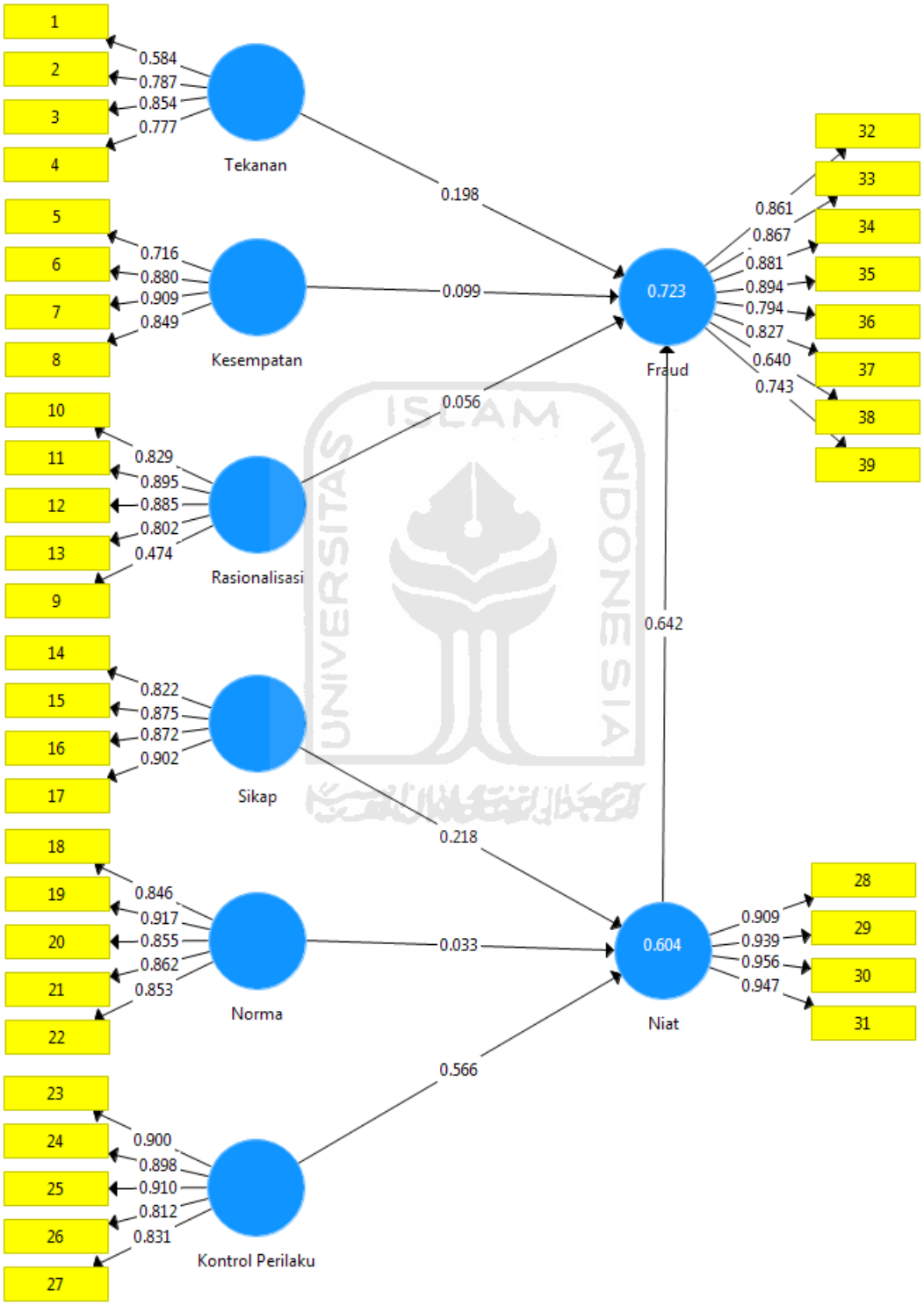
3	5	3	5	5	6	5	5	5	2	1	3	2	1	1	1	1	3	1	2	5	1	2	2	3	3	4	5	5	5	5	5	1	1
2	2	4	5	3	5	2	2	4	4	4	2	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2	5	5	6	6	6	6	4	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6	5	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5
5	5	2	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	2	2	1	1	2	3	2	2	2	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3
4	4	6	6	5	6	4	4	3	5	5	6	5	5	4	4	1	4	4	5	4	5	3	4	5	5	6	5	5	3	3	4	3	5
2	5	5	6	3	5	2	2	5	3	5	5	5	5	4	2	1	4	1	4	2	2	3	2	5	4	5	4	5	5	3	2	2	1
4	6	6	6	6	4	6	5	5	6	6	6	2	4	3	2	1	5	6	5	1	4	6	3	3	1	1	1	1	2	1	5	1	6
3	3	3	5	5	6	5	6	3	6	3	3	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	6	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3
1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
5	5	1	6	6	6	6	6	6	5	2	5	1	5	1	1	1	1	1	1	6	1	1	6	1	6	6	6	1	3	1	1	1	1
6	2	4	4	3	5	2	4	4	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2	5	2	4	6	4	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	3	2
1	4	4	5	6	6	5	4	6	1	5	4	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	3	4	4	4
3	4	4	4	3	5	2	3	4	5	3	4	4	5	3	4	2	4	4	4	4	4	2	3	4	5	5	5	4	4	4	4	3	2
3	4	3	5	5	5	4	4	3	3	4	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	4	2	4	2	2	2	2
2	3	2	1	1	4	2	2	3	4	3	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	1	1	1
2	5	2	2	5	5	2	2	2	2	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	2	2	2	5	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	2	5	3	3	3	3	5	4	4	5	5	4	2	2	2	2

1	2	2	5	3	5	2	3	3	3	4	5	4	5	4	3	2	3	3	4	5	4	4	3	5	5	5	5	4	4	2	2	2	3
2	2	2	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2
2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	2	2	4	2	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
1	1	2	4	2	2	2	2	4	4	4	2	2	4	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
3	4	4	4	3	5	2	3	4	5	3	4	4	5	3	4	2	4	4	4	4	4	2	3	4	5	5	5	4	4	4	4	3	2
2	3	5	3	3	3	4	4	5	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	5	4	4	4	4	2	3	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2
3	4	3	3	3	3	5	4	3	3	3	5	4	2	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2
2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
1	6	1	4	4	6	2	3	3	1	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	5	5	3	6	5	5	5	5	5	5	4	6	3	3
2	2	2	2	2	5	2	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	3	4	3	2	2	4	4	4	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
2	4	2	2	2	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2
4	4	4	4	2	2	2	5	4	5	3	4	5	4	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	5
2	2	5	3	5	5	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	4	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
2	3	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
2	3	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
5	5	4	5	4	3	3	4	4	5	2	4	5	4	4	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	1	2
2	5	2	2	2	3	4	3	3	4	3	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1
2	5	4	5	4	2	4	4	2	2	4	2	2	4	2	2	2	4	2	2	4	4	3	2	4	5	5	4	4	4	4	2	2	2
2	4	4	2	2	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	2	4	4	4	4	2	4	2	4	3	4	4	3	2	2	2
2	3	2	5	4	5	2	4	2	3	5	2	4	2	1	1	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

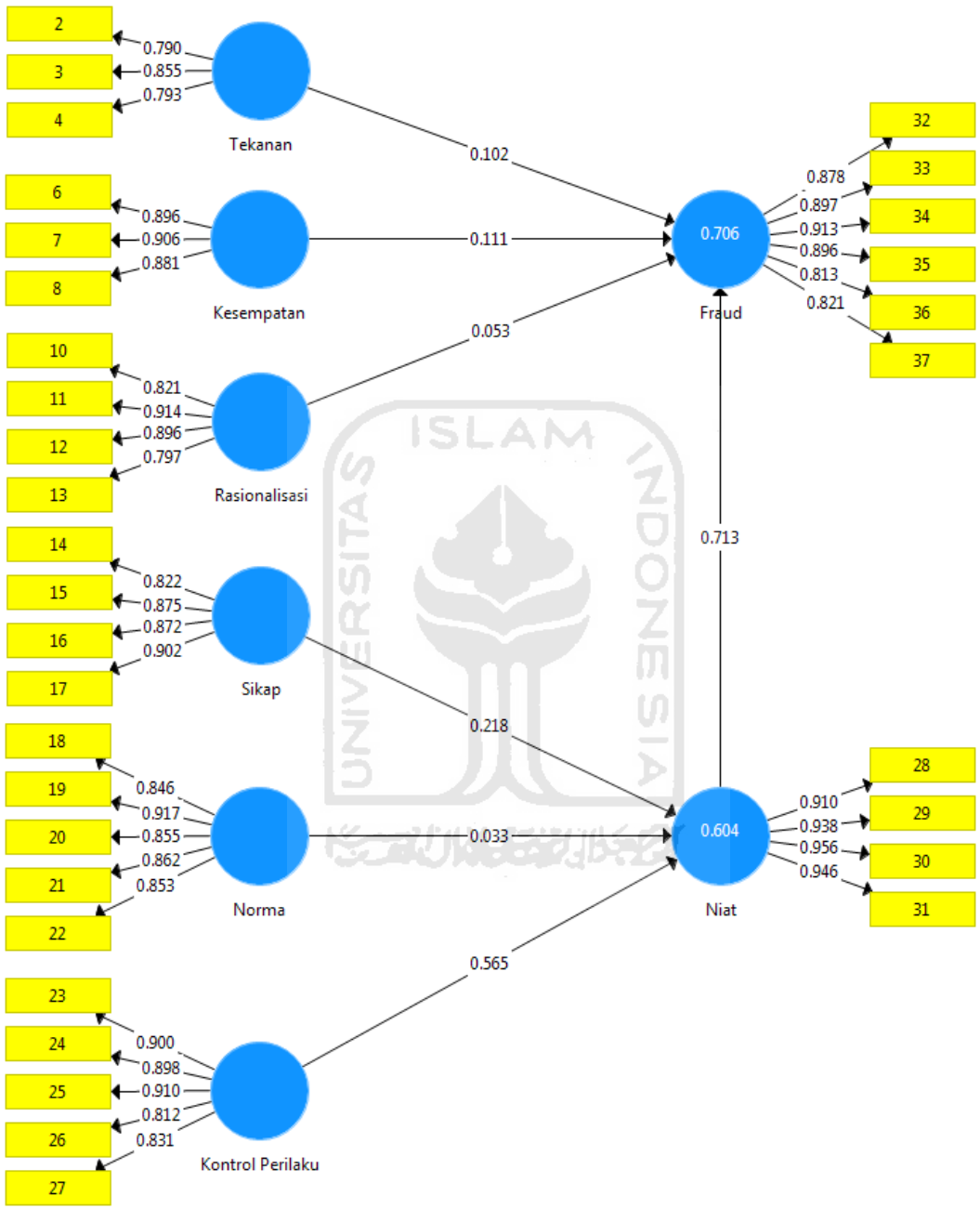
5	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	6	5	5	5	6	2	1	1	1	1
1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	3	2	2	2	2	1	2	1
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	4	4	2	5	5	4	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2
2	2	2	4	4	2	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2
2	2	2	4	4	2	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2
2	5	5	5	4	4	5	2	3	2	2	2	4	2	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2

2	5	5	5	4	4	5	2	3	2	2	2	5	5	5	5	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
3	4	2	3	3	4	4	3	4	4	3	2	2	2	2	2	3	3	1	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2
2	2	2	5	5	5	5	5	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2
2	2	2	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	4	1	5	3	4	2	2	2	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1
4	2	2	5	4	5	5	5	5	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2	3	4	2	2	2	2	5	2

Lampiran 3 : Diagram Model (PLS Algorithm) – Awal



Lampiran 4 : Diagram Model (PLS Algorithm) – Akhir



Lampiran 5 : Diagram Model (Bootstrapping)

